



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BOGOR 2019



# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BOGOR 2019**

**ISSN** :  
**Nomor Publikasi** : 32010.1945  
**Katalog** : 40102004.3201

**Ukuran Buku** : 17,6 x 25 cm  
**Jumlah Halaman** : x + 96 halaman

**Naskah:**

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Penyunting:**

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Desain Sampul:**

Tri Isdinarmiati, S.ST,SE, M.Si

**Diterbitkan oleh:**

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor

**Dicetak oleh:**

CV SUMBER CAHAYA

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat statistik

**Tim Penyusun**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN BOGOR  
2019**

Penanggung Jawab Umum :  
Sarwono, S.Si, M.M

Penanggung Jawab Teknis :  
Panca Nugraha, S.ST

Editor:  
Panca Nugraha, S.ST

Penulis:  
Tri Isdinarmiati, S.ST, SE, M.Si

Pengolahan Data :  
Tri Isdinarmiati, S.ST, SE, M.Si

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor yang menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Jawa Barat antar waktu dan perbandingannya antar Kabupaten/Kota. Publikasi ini berisi berbagai data yang bersumber dari data BPS yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019, dan Proyeksi Penduduk Jawa Barat 2010-2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Cibinong, Desember 2020  
Kepala BPS Kabupaten Bogor

Sarwono, S.Si, M.M  
NIP. 19640609 198702 1 001

# Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
Daftar Peta	x
<b>1. Kependudukan</b>	<b>1</b>
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	2
1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk	7
1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan	10
1.4 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama	14
1.5 Penggunaan Alat /Cara KB	17
<b>2. Kesehatan</b>	<b>19</b>
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	19
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	23
<b>3. Pendidikan</b>	<b>30</b>
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	30
3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	32
3.3 Tingkat Pendidikan	37

<b>4. Ketenagakerjaan</b>	41
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	43
4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	50
4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	55
4.4 Sektor Formal dan Sektor Informal	59
<b>5. Perumahan dan Lingkungan</b>	62
5.1 Kualitas Rumah Tinggal	63
5.2 Fasilitas Rumah Tinggal	65
5.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	69
<b>6. Kemiskinan</b>	71
6.1 Perkembangan Penduduk Miskin	74
6.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	76
6.3 Fasilitas yang Diterima Rumah Tangga Miskin	80
<b>7. Sosial Lainnya</b>	83
7.1 Tindak Kejahatan	84
7.2 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	87
7.3 Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis	88

# Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur (10 tahunan) dan Jenis Kelamin di kabuapten Bogor, 2019	11
Tabel 1.2	Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kabupaten Bogor, 2019	12
Tabel 1.3	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, <i>Sex Ratio dan Dependency Ratio</i> di Kabupaten Bogor, 2018-2019	13
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Lebih Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kabupaten Bogor, 2019	15
Tabel 1.5	Persentase Penduduk Umur 15-49 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kabupaten Bogor, 2019	15
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, 2018-2019	22
Tabel 2.2	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, 2019	23
Tabel 2.3	Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2018-2019	25
Tabel 2.4	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Bogor, 2019	27
Tabel 2.5	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Bogor, 2018-2019	29

Tabel 3.1	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan Kemampuan membaca dan menulis, di Kabupaten Bogor , 2018-2019	32
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan, Kabupaten Bogor 2019	40
Tabel 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Bogor, Agustus 2018 - 2019	44
Tabel 4.2	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kabupaten Bogor, Agustus 2019	55
Tabel 5. 1	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas Kabupaten Bogor 2018 dan 2019	63
Tabel 5. 2	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas, Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan 2019	64
Tabel 5. 3	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Perkapita (m <sup>2</sup> ), Kabupaten Bogor 2018 dan 2019	65
Tabel 5. 4	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan 2019	66
Tabel 5. 5	Persentase Rumah Tangga Menurut Ketersediaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan 2019	68
Tabel 5. 6	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, Kabupaten Bogor 2019	70
Tabel 6. 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor Tahun 2010-2019	76
Tabel 6. 2	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan 2019	81

Tabel 6. 3	Persentase Penduduk Menurut Apakah Menggunakan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bogor, 2019	82
Tabel 7. 1	Persentase Anggota Rumah Tangga berusia 5 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Penggunaan Teknologi Informasi dalam 3 Bulan Terakhir, Kabupaten Bogor 2019	88
Tabel 7. 2	Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Pelayanan Kesehatan, 2018 dan 2019	89

<https://bogorkab.bps.go.id>

# Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019	4
Gambar 1.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor, 2019	6
Gambar 1.3 Sebaran Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan, Tahun 2019	8
Gambar 1.4 Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup> di Kabupaten Bogor, Tahun 2019	9
Gambar 1.5 Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, Kabupaten Bogor Tahun 2018-2019	16
Gambar 1.6 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Partisipasi Menggunakan Alat KB/Cara KB, Kabupaten Bogor 2018 dan 2019	18
Gambar 2.1 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kabupaten Bogor (tahun), 2014-2019	20
Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor , Tahun 2014-2019	33
Gambar 3.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2019	34
Gambar 3.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2019	36
Gambar 3.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah tertinggi yang dimiliki, Kabupaten Bogor 2019	38
Gambar 3.5 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Yang Masih Sekolah Kabupaten Bogor 2019	39

Gambar 4.1	Komposisi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2019	45
Gambar 4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, Agustus 2019	46
Gambar 4.3	Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Bogor 2019	47
Gambar 4.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Tahun 2010-2019	48
Gambar 4.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, Agustus 2018 dan 2019	49
Gambar 4.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Bogor, Agustus 2019	51
Gambar 4.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor, Agustus 2015-2019	52
Gambar 4.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, Agustus 2019	53
Gambar 4.9	Struktur Lapangan Usaha Penduduk yang Bekerja Menurut jenis kelamin di Kabupaten Bogor, Agustus 2019	56
Gambar 4.10	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bogor , Agustus 2018 dan 2019	57
Gambar 4.11	Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja menurut Jenis kelamin di Kabupaten Bogor, Agustus 2019	58
Gambar 4.12	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal dan Informal di Kabupaten Bogor, Agustus 2018 dan 2019	60

Gambar 5.1	Proporsi Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak, Kabupaten Bogor 2019	67
Gambar 5.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Sendiri (%), di Jawa Barat, 2019	69
Gambar 6.1	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bogor, 2010-2019	75
Gambar 6.2	Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor, 2014-2019 (Rupiah)	77
Gambar 6.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bogor, Tahun 2014-2019	78
Gambar 6.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Bogor, Tahun 2014-2019	79
Gambar 7.1	Persentase Penduduk Kabupaten Bogor yang Pernah Menjadi Korban Tindak Kejahatan 2018 dan 2019	84
Gambar 7.2	Persentase Penduduk yang Mengalami Korban Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019	86

# Daftar Peta

		Halaman
Peta 1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bogor, 2019	5
Peta 1.2	Sebaran Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2019	8

<https://bogorkab.bps.go.id>

# 1 Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus juga yang menikmati hasil pembangunan namun juga bisa menjadi masalah yang bisa menghambat pembangunan suatu negara. Masalah kependudukan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah dan Negara.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diimbangi dengan kualitas penduduk akan menjadi kendala pembangunan. Masalah yang berkaitan dengan penduduk merupakan tugas besar dari semua pihak khususnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Masalah kependudukan adalah salah satu masalah krusial yang mengakibatkan efek domino terhadap permasalahan lain yaitu lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal kependudukan, karena Jumlah Penduduk Indonesia merupakan penduduk terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan urutan empat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan Proyeksi penduduk Provinsi Jawa Barat 2010-2020, Provinsi Jawa Barat saat ini merupakan provinsi dengan Jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 49,32 juta jiwa

pada tahun 2019. Jika dilihat lebih dalam lagi, kabupaten yang saat ini menempati urutan pertama jumlah penduduk terbesar di seluruh kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Barat dan sekaligus urutan pertama jumlah penduduk terbesar di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia adalah Kabupaten Bogor, dengan jumlah penduduk mencapai 5,97 juta jiwa pada tahun 2019.

### **1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan membawa ke arah kemajuan pembangunan, sebaliknya penduduk yang tidak berkualitas akan menjadi beban dalam pembangunan. Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk yang besar merupakan potensi sekaligus modal dasar pembangunan.

Dengan banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Bogor, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor kedepannya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadi beban pemerintah dalam penyediaan berbagai kebutuhan yang diperlukan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti akan terjadi penambahan berbagai fasilitas pelayanan umum yang diperlukan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan papan dan juga penyediaan lapangan pekerjaan. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Salah satu dampak yang bisa kita rasakan sampai saat ini adalah kemacetan lalu lintas. Dengan jumlah penduduk sekitar 5.965.410 jiwa (proyeksi tahun 2019) kemacetan merupakan suatu hal konkret yang akan dapat dengan mudah kita lihat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat kepadatan populasi yang tinggi,

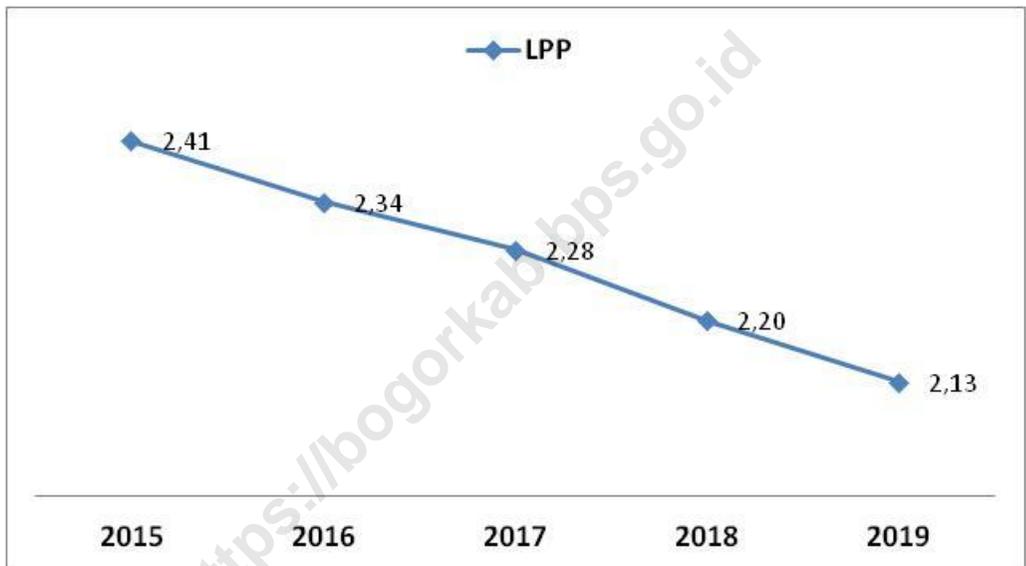
Kabupaten Bogor tentunya membutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendukung sebagai tindakan preventif dan penyelesaian terhadap masalah kemacetan yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Bogor selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2019 sebesar 2,13 persen. Ini artinya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,13 persen. Jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 5,46 juta jiwa mengalami peningkatan sebesar 9,26 persen pada tahun 2019 atau dengan kata lain mengalami penambahan sebanyak 0,51 juta jiwa. Bila dicermati pertumbuhan penduduk antar kecamatan yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Bogor, hasil proyeksi penduduk tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Gunung Putri, Bojonggede dan Cileungsi masing-masing sebesar 4,91 persen, 4,50 persen dan 4,36 persen. Dari jumlah penduduk sebanyak 5,97 juta jiwa pada tahun 2019 yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gunung Putri sebanyak 499,80 ribu jiwa, Kecamatan Cibinong sebanyak 455,84 ribu jiwa dan Kecamatan Cileungsi sebanyak 378,75 ribu jiwa.

BPS mencatat rasio jenis kelamin penduduk Jawa Barat tahun 2019 sebesar 102,50. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau terdapat 102,50 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Di Kabupaten Bogor sendiri, rasio jenis kelamin penduduk juga bernilai lebih dari 100 atau

lebih tepatnya 104,28 yang berarti lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan.

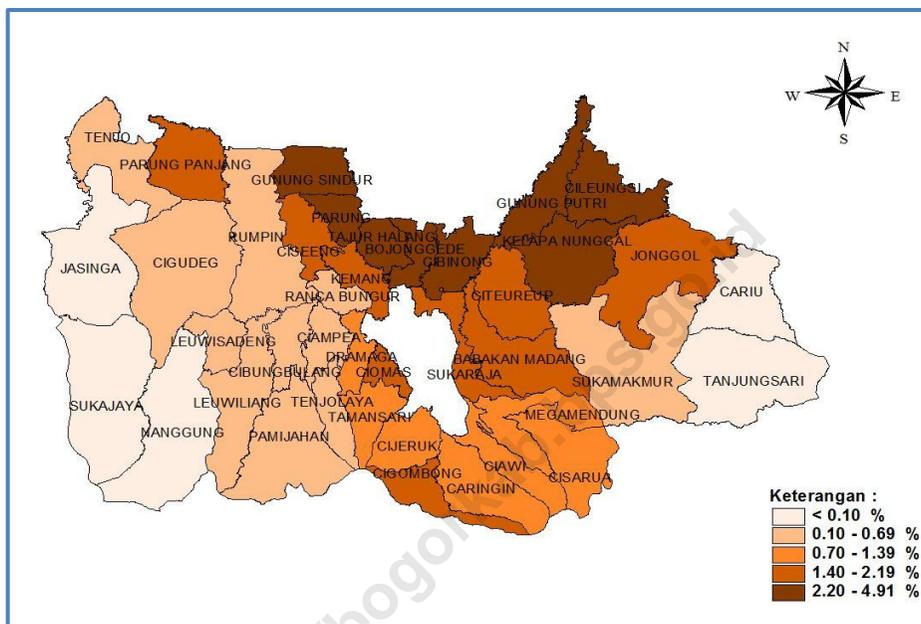
**Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bogor  
Tahun 2015 - 2019**



Sumber : BPS, Proyeksi Hasil SP 2010

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 hingga tahun 2019 (gambar 1.1), laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor sebesar 2,41 persen. Kemudian terus bergerak menurun menjadi 2,34 persen ditahun 2016, 2,28 di tahun 2017, 2,20 di tahun 2018 dan hingga saat ini tahun 2019 menjadi 2,13 persen. Dengan adanya penurunan ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor dari tahun ke tahunnya.

**Peta 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan  
di Kabupaten Bogor, 2019**

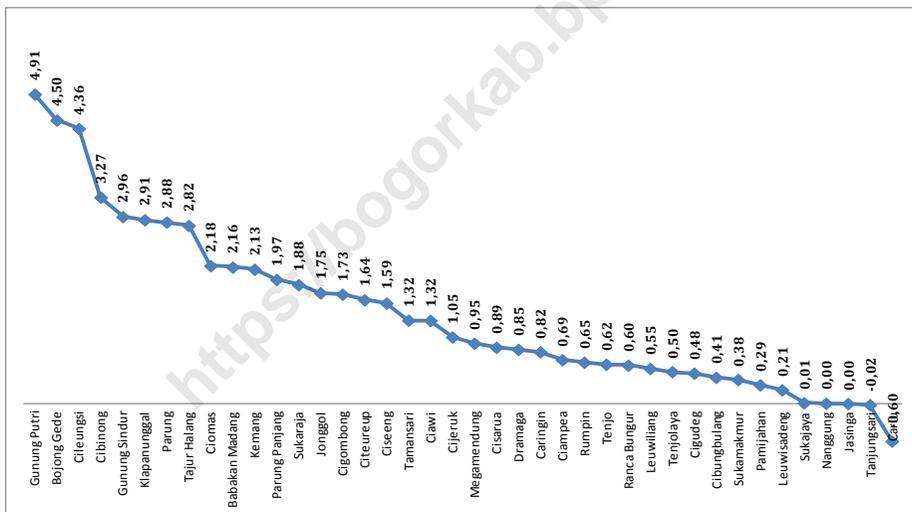


Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Bogor, 2010-2020

Pertumbuhan penduduk tahun 2019 tingkat kecamatan disajikan pada Peta 1.1. Ada 10 kecamatan dengan pertumbuhan penduduk di atas pertumbuhan rata-rata kabupaten Bogor (2,13 %) diantaranya Kecamatan Gunung Putri (4,91 %), Bojong Gede (4,50 %), Cileungsi (4,36 %), Cibinong (3,27 %), Gunung Sindur (2,96 %), Klapanunggal (2,91 %), Parung (2,88 %), Tajur Halang (2,82 %), Ciomas (2,18%) dan Babakan Madang (2,16 %). Kecamatan Tajurhalang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bojong Gede yang menjadi tujuan sebagai pemukiman bertempat tinggal. Sementara Kecamatan Kelapa Nunggal merupakan pemekaran dari Kecamatan Cileungsi yang merupakan daerah pengembangan usaha industri. Adapun Kecamatan Gunung Sindur merupakan daerah pertumbuhan baru sebagai imbas dari

pertumbuhan Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Cibinong merupakan ibu kota Pemerintahan Kabupaten Bogor dan Parung merupakan kecamatan penyangga Kota Depok. Kecamatan Ciomas merupakan pusat industri kecil menengah. Kecamatan Babakan Madang merupakan wilayah industri dan pemukiman yang dikenal dengan kawasan Industri Sentul Selatan. Sebagian besar kecamatan (75 %) yang ada di Kabupaten Bogor memiliki pertumbuhan penduduk dibawah rata-rata pertumbuhan penduduk kabupaten Bogor (Gambar 1.2.).

**Gambar 1.2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor, 2019**



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Bogor, 2010-2020

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa variabel kependudukan diantaranya lahir dan datang sebagai variabel penambah, sedangkan mati dan pindah sebagai variabel pengurang jumlah penduduk. Beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor merupakan wilayah industri dan pemukiman yang nyaman karena dekat dengan ibukota

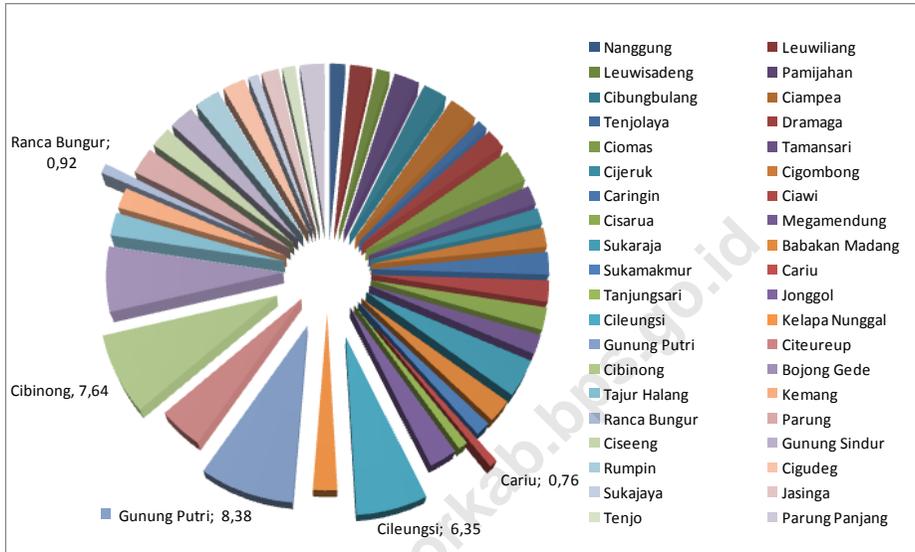
Jakarta, hal menjadi daya tarik utama masuknya penduduk dari wilayah lain yang berdampak meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten Bogor.

## **1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk**

Persoalan lain yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Sejalan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, maka kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain. Jika dilihat menurut tipe daerah, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor untuk daerah perkotaan sebanyak 86 persen jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah perdesaan yang hanya 14 persen.

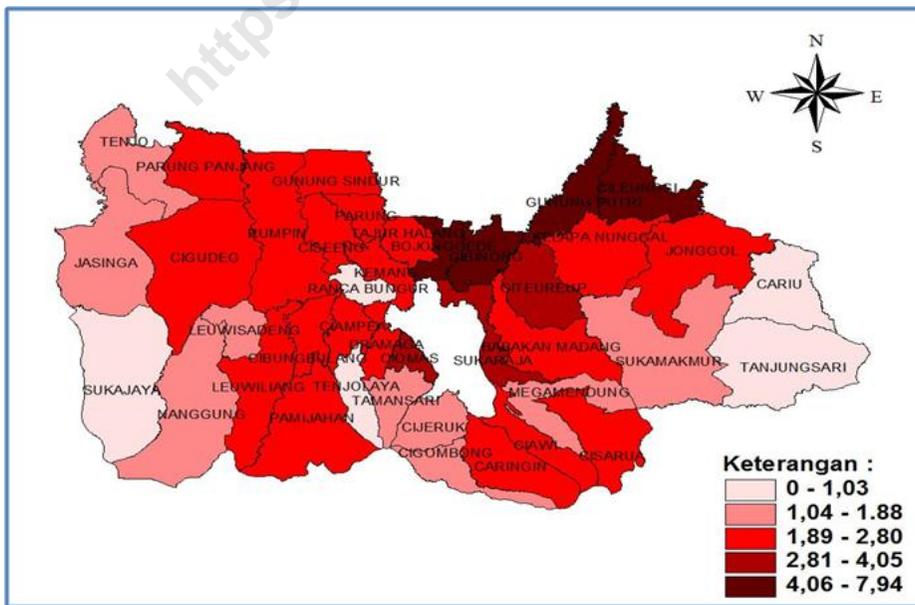
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, sebesar 7,56 persen penduduk Kabupaten Bogor bermukim di Kecamatan Cibinong yang merupakan ibukota Kabupaten Bogor sekaligus merupakan pusat pemerintah Kabupaten Bogor. Kemudian Kecamatan Gunung Putri sebesar 8,16 persen dan Cileungsi sebesar 6,21 persen dari total penduduk Kabupaten Bogor. Pada tahun 2019, sebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Gunung Putri sebesar 8,38 persen, kemudian Kecamatan Cibinong sebesar 7,64 persen. Ini memberi petunjuk bahwa Kecamatan Gunung Putri masih menjadi tujuan sebagai kawasan industri sekaligus tujuan tempat pemukiman dan Kecamatan Cibinong memiliki daya tarik karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (gambar 1.3 dan peta 1.2).

**Gambar 1.3. Sebaran Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan, Tahun 2019**



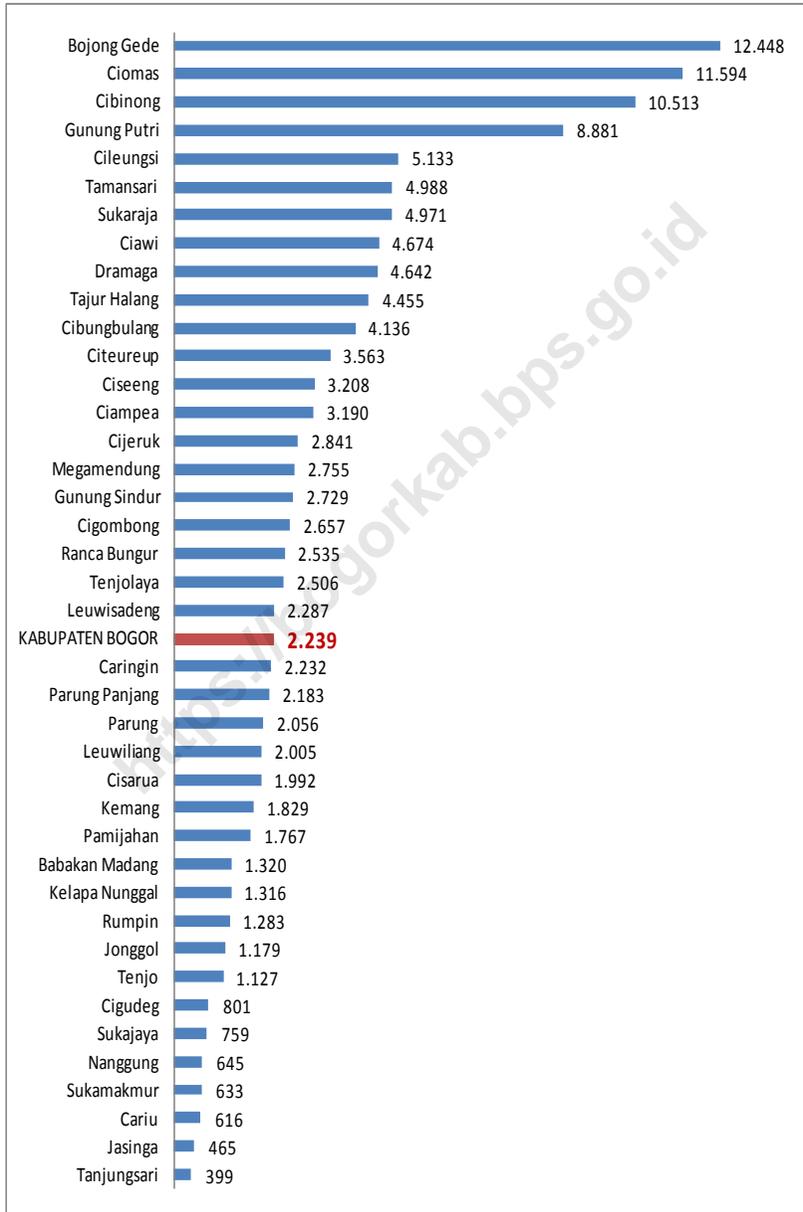
Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Bogor, 2010-2020

**Peta 1.2. Sebaran Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2019**



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Bogor, 2010-2020

**Gambar 1.4. Kepadatan Penduduk per Km<sup>2</sup> di Kabupaten Bogor, Tahun 2019**



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Bogor, 2010-2020

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, kepadatan penduduk tahun 2019 di Kabupaten Bogor berkisar antara 399 jiwa per km<sup>2</sup> (Kecamatan Tanjung sari) hingga 12.448 jiwa per km<sup>2</sup> (Kecamatan Bojonggede) seperti pada gambar 1.4 .

Kepadatan penduduk Kecamatan Bojonggede paling tinggi sebesar 12.448 jiwa per km<sup>2</sup> melebihi kepadatan penduduk Kecamatan Ciomas yang pernah menjadi kecamatan paling padat penduduk. Kondisi ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bojonggede yang hampir dua kali laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Ciomas. Kecamatan Cibinong merupakan kecamatan yang terpadat berikutnya setelah Bojonggede dan Ciomas dengan kepadatan 10.513 jiwa per km<sup>2</sup>.

### **1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan**

Penyajian data penduduk menurut kelompok umur seringkali disederhanakan menjadi tiga kelompok, yaitu 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun atau lebih. Penduduk juga dapat digolongkan atas usia produktif atau tidak produktif. Jika persentase penduduk usia kurang dari 15 tahun (0-14 tahun) minimal 40 persen dan penduduk 65 tahun keatas melebihi 5 persen dari total penduduk maka digolongkan penduduk usia tidak produktif. Sebaliknya penduduk usia produktif, apabila persentase mereka yang berusia (0-14) tahun maksimal 30 persen dan mereka yang berusia (15-64) tahun persentasenya lebih dari 60 persen.

**Tabel 1.1. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, 2019**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 9	19,40	19,54	19,47
10-19	18,76	18,54	18,65
20 - 29	17,63	18,08	17,85
30 - 39	15,86	16,17	16,01
40 - 49	13,29	12,63	12,97
50 - 59	8,44	8,09	8,27
60 +	6,61	6,96	6,78
<b>Kabupaten Bogor</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Susenas, Maret 2019

Dari gambaran di atas dan tabel 1.2 dibawah dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Bogor tergolong “muda” karena penduduk usia 15-64 tahun lebih dari 40 persen. Penduduk Kabupaten Bogor tergolong menuju ke arah penduduk usia produktif karena penduduk usia 15-64 tahun lebih dari 60 persen yaitu sebanyak 67,25 persen untuk yang berjenis kelamin laki-laki dan 66,75 persen untuk yang berjenis kelamin perempuan, dan penduduk 0-14 tahun kurang dari 30 persen yaitu sebanyak 28,88 persen, sedang penduduk usia 65 keatas sebanyak 4,11 %. Implikasi tingginya jumlah penduduk usia produktif mengindikasikan bahwa permasalahan

ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius.

**Tabel 1.2. Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur di Kabupaten Bogor, 2019**

Karakteristik	Kelompok Umur			Total
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	28,90	67,25	3,85	100,00
Perempuan	28,86	66,75	4,40	100,00
40 Persen Terbawah	34,12	61,35	4,53	100,00
40 Persen Tengah	25,92	70,03	4,05	100,00
20 Persen Teratas	24,32	72,27	3,41	100,00
Kabupaten Bogor	28,88	67,01	4,11	100,00

Sumber : Susenas, Maret 2019

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Komposisi penduduk Kabupaten Bogor jika dilihat dari rasio jenis kelamin (Tabel 1.3), pada tahun 2019 sebesar 104,28. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 104 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 1.3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Dependency Ratio di Kabupaten Bogor, 2018-2019**

Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk			Sex Ratio	Dependency
	Laki-laki	Perempuan	Total		Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	51,08	48,92	100,00	104,42	49,14
2019	51,05	48,95	100,00	104,28	48,96

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Bogor

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Menurut data Susenas 2019, Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 sebesar 48,96 (Tabel 1.3). Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 50 penduduk usia tidak produktif 0-14 tahun dan 65

tahun ke atas). Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah setempat.

#### **1.4 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama**

Usia Kawin Pertama bisa dijadikan salah satu pemicu penambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Pada usia itu, remaja sudah tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun anak dari pasangan muda itu, jadi dimasa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Dengan tumbuhnya usia nikah semakin dewasa dapat menunjang keberhasilan program KB melalui menurunnya angka anak dilahirkan seorang ibu.

**Tabel 1.4. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun lebih Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kabupaten Bogor, 2019**

Karakteristik	Status Perkawinan			Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	39,81	55,69	4,50	100,00
Perempuan	29,25	59,54	11,21	100,00
40 Persen Terbawah	36,74	54,83	8,43	100,00
40 Persen Tengah	32,42	60,25	7,33	100,00
20 Persen Teratas	35,35	57,31	7,34	100,00
Pendidikan tertinggi ART - SD ke bawah	36,60	52,50	10,89	100,00
Pendidikan tertinggi ART - SMP ke atas	32,89	62,33	4,78	100,00
Kabupaten Bogor	34,69	57,55	7,75	100,00

Sumber : Susenas, Maret 2019

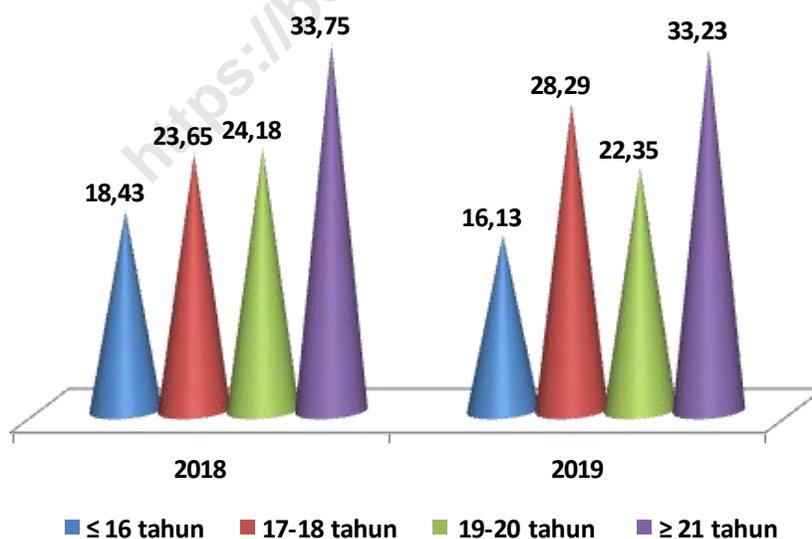
**Tabel 1.5. Persentase Penduduk Umur 15-49 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan di Kabupaten Bogor, 2019**

Karakteristik	Status Perkawinan			Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	40,07	57,54	2,38	100,00
Perempuan	25,07	70,24	4,69	100,00
40 Persen Terbawah	32,86	63,79	3,35	100,00
40 Persen Tengah	31,89	64,31	3,8	100,00
20 Persen Teratas	34,46	62,35	3,18	100,00
Pendidikan tertinggi ART - SD ke bawah	25,26	71,08	3,66	100,00
Pendidikan tertinggi ART - SMP ke atas	36,77	59,81	3,42	100,00
Kabupaten Bogor	32,80	63,70	3,50	100,00

Sumber : Susenas, Maret 2019

Berdasarkan hasil Susenas 2019, baik penduduk yang berusia 10 tahun keatas maupun penduduk yang berusia 15-49 tahun menunjukkan persentase penduduk perempuan yang berstatus pernah kawin lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Penduduk perempuan yang berusia 15-49 tahun yang pernah kawin yaitu sebesar 70,24 persen, sedang yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 57,54 persen. Demikian juga persentase penduduk perempuan yang bercerai sebesar 4,69 persen jauh lebih besar dari penduduk laki-laki yang hanya sebesar 2,38 persen.

**Gambar 1.5. Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2019**



Sumber : Susenas, Maret 2019

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2019, sebagian besar wanita di Kabupaten Bogor melakukan perkawinan pertamanya pada usia lebih dari 21 tahun yaitu sebesar 33,23 persen, berlaku juga pada tahun sebelumnya yang paling banyak wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia 21 tahun yaitu sebesar 33,75 persen.

Yang perlu kita telaah lebih lanjut yaitu wanita yang melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 16 tahun. Persentase wanita Kabupaten Bogor berusia kurang dari 16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 16,13 persen di tahun 2019 atau mengalami penurunan dari tahun yang mencapai 18,43 persen. Penurunan ini menunjukkan kondisi yang semakin baik karena pada usia 10-16 tahun seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga. Sehingga seharusnya diusia-usia tersebut, anak-anak belum melakukan sebuah perkawinan.

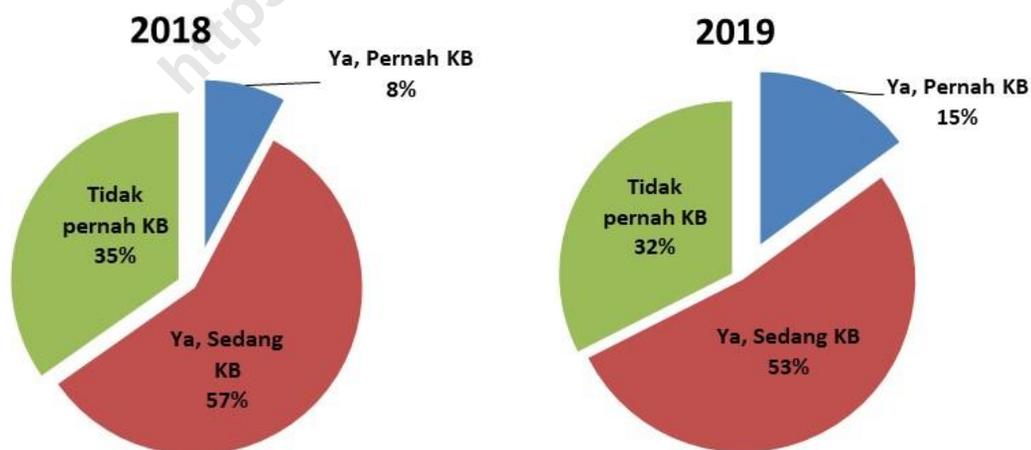
### **1.5 Penggunaan Alat/Cara KB**

Pemerintah saat ini sudah menggalakkan kembali program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.

Dari gambar 1.6. terlihat bahwa di Kabupaten Bogor, di tahun 2018 dan 2019 perempuan yang berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin masih di dominasi dengan perempuan yang sedang menggunakan alat/cara KB dibandingkan dengan yang pernah maupun tidak pernah mengikuti program KB, yaitu mencapai diatas 50 persen. Akan tetapi bila dibandingkan antara kedua tahun tersebut, partisipasi yang menggunakan alat/cara KB tahun

2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018 dari 57 persen turun menjadi 53 persen. Begitu juga untuk yang tidak pernah menggunakan alat/cara KB tahun 2019 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 35 persen menurun menjadi 32 persen. Pemakaian alat kontrasepsi/KB ini bisa menjadi salah satu variabel penting dalam menurunkan angka kelahiran. Tahun 2019 perempuan yang berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/ cara KB sekitar 53 persen. Yang pernah menggunakan alat/cara KB sekitar 15 persen. Yang tidak pernah menggunakan alat/cara KB sebesar 32 persen.

**Gambar 1.6. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Partisipasi Menggunakan Alat/Cara KB, Kabupaten Bogor 2018 dan 2019**



Sumber : Susenas, Maret 2019

# 2 Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat harus dipelihara dan ditingkatkan. Hal tersebut tidak hanya penting bagi masyarakat itu sendiri, tetapi juga penting bagi negara. Penduduk yang sehat akan lebih mudah dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, kesehatan masyarakat dapat menjadi investasi dan membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing bagi pembangunan nasional.

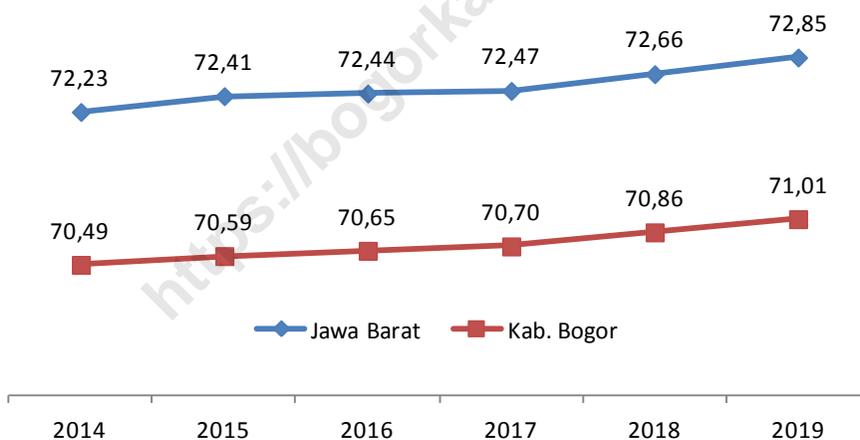
Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat Imunitas dan gizi balita dan sebagainya.

## 2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019, disebutkan bahwa sasaran pembangunan kesehatan tahun 2025 yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dicerminkan dengan

meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita (Kementerian Kesehatan, 2015). Peningkatan usia harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

**Gambar 2.1 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Bogor (Tahun), 2014-2019**



Sumber : BRS BPS Jawa Barat IPM 2019

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting yang berperan sebagai alat ukur kinerja pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional, khususnya bidang kesehatan. UHH menggambarkan jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai bayi yang

baru lahir untuk hidup, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Nilai UHH yang tinggi mencerminkan derajat kesehatan penduduk yang tinggi dan kemampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori penduduk, serta kesehatan lingkungan yang baik. Apabila nilai UHH rendah di suatu daerah, maka perlu dipelajari lebih lanjut penyebabnya dan bagaimana solusi untuk mengatasinya.

Jika kita lihat UHH di Kabupaten Bogor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 telah berhasil mengalami peningkatan sebesar 0,52 tahun atau tumbuh sebesar 0,15 persen per tahun. Pada tahun 2014 UHH Kabupaten Bogor sebesar 70,49 tahun, kemudian terus meningkat secara perlahan hingga pada tahun 2019 UHH Kabupaten Bogor sudah mencapai 71,01 tahun. Angka UHH sebesar 71,01 tahun ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,01 tahun, lebih lama 0,15 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir ditahun sebelumnya.

Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan UHH Provinsi Jawa Barat terlihat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan UHH Kabupaten Bogor. Kondisi ini juga terlihat gap UHH Kabupaten Bogor dan UHH Provinsi Jawa Barat cenderung semakin lebar. Pada tahun 2014 gap UHH Kabupaten Bogor dengan UHH Provinsi sebesar 1,74 cenderung melebar menjadi 1,84 di tahun 2019. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa jalinan sinergitas, kerja keras antar berbagai sektor di bidang kesehatan sedang terus ditingkatkan. Dengan adanya peningkatan UHH, selain mencerminkan peningkatan derajat kesehatan, di sisi lain, mencerminkan juga semakin bertambahnya populasi penduduk lanjut usia (lansia). Sehingga perlunya

perhatian yang serius untuk mempersiapkan penduduk lansia agar tetap sehat, produktif dan sejahtera. Karena penduduk lansia yang tidak sehat dan tidak mandiri akan memberikan dampak sosial ekonomi yang buruk bagi bangsa dan negara.

Selain Usia Harapan Hidup, indikator morbiditas juga dapat mencerminkan kondisi kesehatan penduduk Kabupaten Bogor. Pada tahun 2019 terdapat 32,94 persen penduduk Kabupaten Bogor yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Keluhan kesehatan yang dimaksud yaitu keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan baik laki-laki maupun perempuan hampir sama besar, dimana laki-laki yaitu 31.23 persen, sedang perempuan 34.76 persen.

**Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, 2018-2019**

Karakteristik	Keluhan Kesehatan					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	32,70	67,30	35,93	64,07	34,28	65,70
2019	31,23	68,77	34,76	65,24	32,94	67,06

Sumber : Susenas Maret 2019

Keluhan kesehatan yang diikuti dengan terganggunya aktivitas seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari dibagi total penduduk disebut angka kesakitan. Tahun 2019 tercatat angka kesakitan di Kabupaten Bogor sebesar 16,50 persen, dengan angka kesakitan penduduk laki-laki dan perempuan masing-masing 16,08 persen dan 16,94 persen.

**Tabel 2.2 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, 2019**

Karakteristik	Angka Kesakitan
(1)	(2)
Laki-laki	16,08
Perempuan	16,94
40 Persen Terbawah	18,12
40 Persen Tengah	16,25
20 Persen Teratas	13,77
<b>Kabupaten</b>	<b>16,50</b>

Sumber : Susenas, Maret 2019

## 2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu persoalan pembangunan yang masih terus bergulir di seluruh wilayah Indonesia. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal (AKN), dan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator strategis pembangunan kesehatan yang mencerminkan derajat kesehatan dan kualitas penduduk. Ketiga angka ini digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan kependudukan. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan

anak ditengarai menjadi penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan dapat berupa akses terhadap tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kualitas layanan kesehatan. Fasilitas tenaga kesehatan, tenaga medis yang handal dan fasilitas kesehatan yang lengkap sangatlah penting dalam mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi.

Banyak hal yang menyebabkan angka kematian ibu masih tinggi. Hasil SDKI menunjukkan penyebab utama kematian ibu di Indonesia yaitu pendarahan setelah melahirkan, hipertensi, dan infeksi setelah melahirkan. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa kematian ibu juga dapat disebabkan karena terlambat di rumah, di perjalanan, dan di unit layanan kesehatan (Detik.com, 2013). Yang dimaksud terlambat di rumah yaitu kurangnya pengetahuan suami dan istri terkait kehamilan dan proses persalinan, serta faktor pembiayaan untuk persalinan. Terlambat di perjalanan artinya belum tersedianya sarana transportasi yang siap siaga, terutama di daerah perdesaan atau daerah yang jauh dari unit layanan kesehatan. Waktu dan jarak tempuh yang jauh tentunya semakin meningkatkan risiko keterlambatan pertolongan pada proses persalinan. Dan yang terakhir yaitu terlambat di unit layanan kesehatan, dimana sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan terlatih.

Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa disparitas kesehatan ibu dan anak dipengaruhi faktor geografis, seperti daerah terpencil dan kepulauan; ketersediaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan terjangkau belum terpenuhi; kurangnya tenaga kesehatan; dan masalah finansial dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah (Kementerian Kesehatan, 2015).

Proses persalinan merupakan salah satu faktor tidak langsung yang dianggap memengaruhi angka harapan hidup. Kematian bayi lebih rentan terjadi pada ibu yang dalam proses persalinannya tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Suatu daerah dengan angka kematian bayi yang tinggi mencerminkan adanya permasalahan kesehatan yang berdampak pada usia harapan hidup. Pentingnya ibu melahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan perlu didukung dengan melahirkan di tempat pelayanan kesehatan seperti klinik/bidan/praktek dokter, Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, atau Puskesmas/Polindes/Pustu.

**Tabel 2.3 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2018-2019**

Karakteristik	Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir					
	Rumah Sakit/RSIA	Rumah Sakit Bersalin/Klinik	Puskesmas/ Pustu /Praktek Nakes/ Polindes/ Poskesdes	Rumah	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	32,99	17,63	24,93	24,46	0,00	100,00
2019	22,33	25,92	29,06	20,29	2,40	100,00

Sumber : Susenas Maret 2019

Di Kabupaten Bogor pada, persentase ibu yang melahirkan di tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit/RS Bersalin/Klinik/Bidan/Puskesmas/Pustu/Praktek Nakes/Polindes mengalami peningkatan, dari 75,55 persen di tahun 2018 menjadi menjadi sebesar 77,31 persen ditahun 2019 . Faktor pendidikan, pendapatan, dan

pengetahuan dinilai memengaruhi pemilihan tempat melahirkan. Ketersediaan tempat pelayanan kesehatan yang lebih banyak dan mudah dijangkau juga berkontribusi terhadap pemilihan tempat melahirkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin memilih untuk melahirkan di fasilitas kesehatan.

Seperti dalam tabel 2.4 dibawah, ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dengan pendidikan tertinggi ART nya SD ke bawah jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang pendidikan tertinggi ART nya SMP ke atas. Sedangkan bila dilihat dari tingkat pengeluarannya, banyaknya ibu dengan tingkat pengeluaran 20 persen teratas sudah 100 persen menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tempat untuk melahirkan anaknya.

Jika dilihat selama dua tahun terakhir, di Kabupaten Bogor persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin jika dilihat dari penolong proses kelahirannya, paling banyak ditolong oleh bidan. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup besar pada perempuan yang ditolong proses kelahirannya oleh bidan yaitu 60,03 persen dari 52,11 persen pada tahun 2018. Sebaliknya proses kelahirannya dibantu oleh dokter kandungan pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar 22,36 persen dari yang sebelumnya tahun 2018 sebesar 33,57 persen.

Di Kabupaten Bogor penolong kelahiran oleh dukun beranak/paraji masih cukup besar di tahun 2018 yaitu sebesar 12,74 persen, namun di tahun 2019 mulai berkurang banyak yaitu hanya sebesar 0,84 persen. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor pendidikan ibu, faktor budaya dan faktor ekonomi keluarga yang semakin baik serta fasilitas kesehatan untuk menolong persalinan yang semakin tersedia diseluruh pelosok kabupaten Bogor.

**Tabel 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, di Kabupaten Bogor 2019**

Karakteristik	Penolong Proses Kelahiran Terakhir							Total
	Dokter kandungan	Dokter umum	Bidan	Perawat	Dukun beranak /paraji	Lainnya	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
2018	33,57	1,58	52,11	0,00	12,74	0,00	0,00	100,00
2019	22,36	0,00	60,03	16,77	0,84	0,00	0,00	100,00

Sumber : Susenas, Maret 2019

Hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan tidak hanya penolong persalinan, tetapi juga fasilitas tempat berobat. Pelayanan kesehatan salah satunya fasilitas tempat berobat adalah ujung tombak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah pun terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan rendahnya derajat kesehatan masyarakat akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara.

Keputusan masyarakat untuk pergi berobat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi keterjangkauan, maupun sosial budaya. Keputusan seseorang untuk menggunakan pelayanan kesehatan didorong oleh faktor lingkungan (*environment*), karakteristik populasi (*population characteristics*), dan keadaan kesehatan (*health outcomes*). Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan terdiri dari sistem pelayanan kesehatan (seperti kebijakan nasional tentang kesehatan, sumber daya atau tenaga kesehatan) dan lingkungan eksternal (seperti keadaan politik dan ekonomi).
2. Faktor karakteristik populasi terdiri dari karakteristik predisposisi (seperti karakteristik demografi, pengetahuan, atau kepercayaan), sumber daya pemungkin (seperti keadaan ekonomi, akses ke pelayanan kesehatan, baik dari biaya maupun transportasi), dan faktor kebutuhan (seperti keluhan sakit)
3. Faktor keadaan kesehatan yang terdiri dari status kesehatan dan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan. Selain ketiga faktor tersebut, kebiasaan perilaku kesehatan (seperti diet, olahraga, dan perawatan diri) juga berhubungan dengan keputusan penggunaan pelayanan kesehatan (Andersen & Newman, 1995).

Menurut data Susenas 2019 yang diperoleh, ada beberapa tempat berobat yang jadi pilihan masyarakat untuk berobat jalan selama sebulan terakhir, seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktek dokter/bidan, klinik, Puskesmas, UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan), dan praktek pengobatan tradisional. Dari beberapa tempat berobat tersebut, di Kabupaten Bogor persentase terbesar penduduk berobat di praktek dokter/bidan sebesar 33,58 persen kemudian diikuti oleh Puskesmas/pustu yaitu sebesar 33,12 persen dan di urutan ketiga di klinik/praktek dokter sebesar 24,74 persen.

**Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Bogor, 2018-2019**

No.	Tempat Berobat Jalan	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rumah Sakit Pemerintah	8,01	4,65
2	Rumah Sakit Swasta	10,77	10,15
3	Praktek Dokter/Bidan	27,86	33,58
4	Klinik/Praktek Dokter	21,69	24,74
5	Puskesmas /Pustu	33,21	33,12
6	UKBM	0,85	0,43
7	Praktek Pengobatan Tradisional	1,88	1,36
8	Lainnya	0,56	1,14

\*Penghitungan 100% dalam tabel ini adalah mengunjungi dan tidak mengunjungi, dan bukan total baris

Sumber : Susenas, Maret 2019

# 3 Pendidikan

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

## 3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bogor sudah cukup bagus. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2018 dan 2019 persentasenya sangat besar yaitu masing-masing 96,40 persen pada tahun 2018 dan 97,60 persen pada tahun 2019. Bisa kita simpulkan selama 2 tahun terakhir hampir semua penduduk Kabupaten Bogor mampu membaca dan menulis huruf latin.

Apabila kita lihat berdasarkan jenis kelamin, di tahun 2019 persentase penduduk laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis sedikit lebih besar dari pada perempuan. Penduduk laki-laki yang bisa membaca dan menulis latin sebesar 98,76 persen dan perempuan sebesar 96,36 persen. Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Bogor tahun 2019 yang bisa membaca dan menulis huruf selain latin seperti huruf arab juga cukup besar yaitu sebesar 62,08 persen laki-laki dan sebesar 63,33 persen perempuan.

Penduduk usia 15 tahun keatas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Pada tahun 2019 persentase penduduk yang bisa membaca dan menulis huruf latin mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,20 persen yaitu 96,40 ditahun 2018 meningkat menjadi 97,60 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk yang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin/buta huruf di kabupaten Bogor mengalami penurunan. Namun jika dilihat menurut jenis kelamin, di kabupaten Bogor Perempuan yang buta huruf lebih banyak dibandingkan laki-laki baik di tahun 2018 maupun 2019.

**Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas  
Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis,  
Kabupaten Bogor 2018-2019**

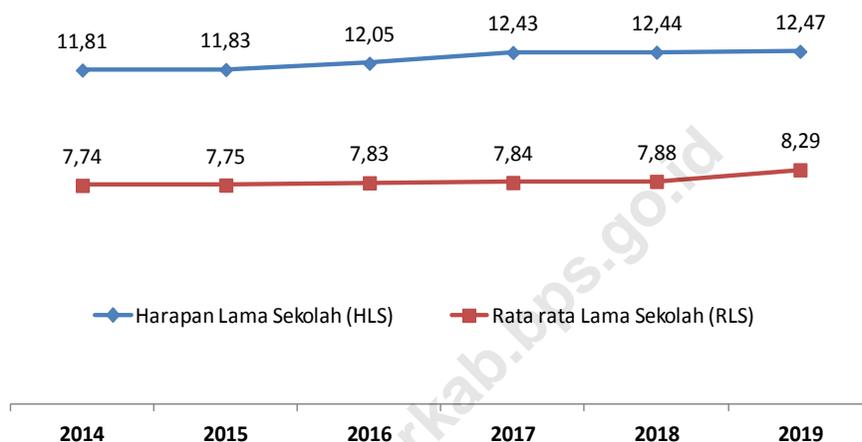
Jenis Kelamin	2018		2019	
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin	Huruf Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	97,79	65,34	98,76	62,08
Perempuan	94,95	62,11	96,36	63,33
Kabupaten Bogor	96,40	63,76	97,60	62,69

*Sumber : Susenas, Maret 2019*

### **3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah**

Dimensi pengetahuan pada indeks pembangunan manusia (IPM) dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2014 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor telah meningkat sebesar 0,55 tahun dari 11,81 di tahun 2014 meningkat mencapai 12,47. sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,41 tahun yaitu 8,29 di tahun 2019 meningkat dari 7,74 di tahun 2018 (Gambar 3.1).

**Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah  
Di Kabupaten Bogor, Tahun 2014-2019**

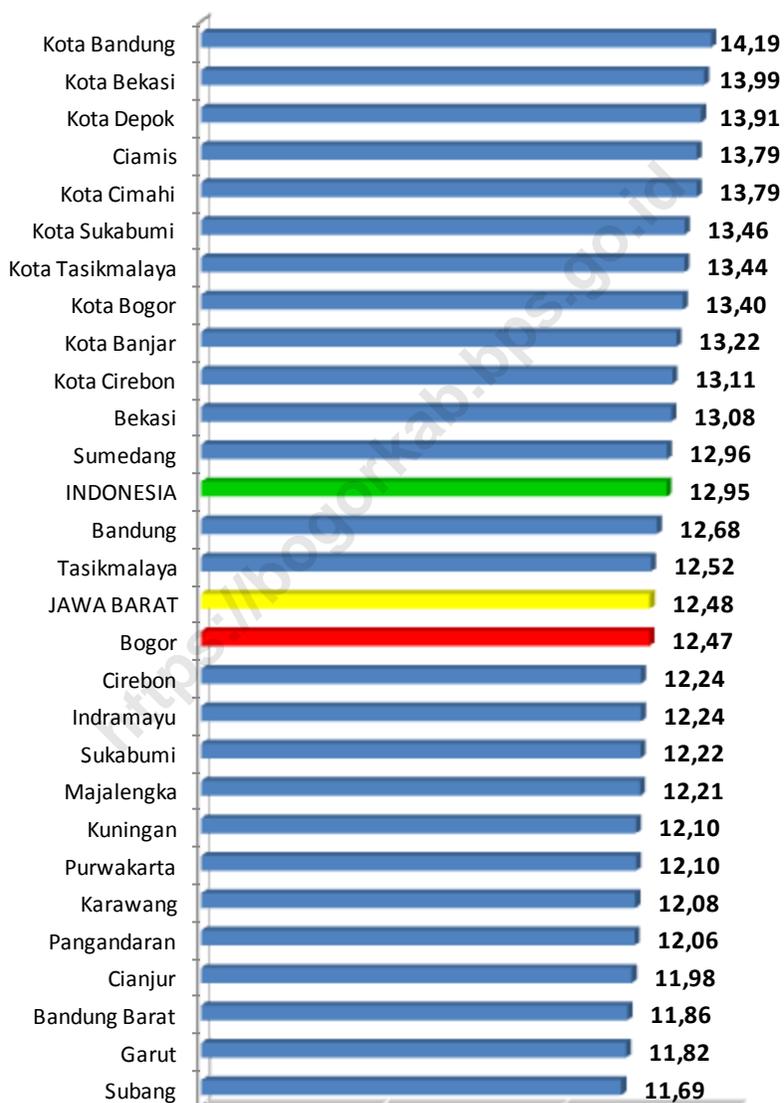


Sumber : IPM 2019

### Harapan Lama Sekolah

HLS merupakan indikator pendidikan yang menunjukkan sampai berapa tahun penduduk usia 7+ tahun di tahun ini akan menyelesaikan pendidikan. Selama periode 2014 hingga 2019, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,33 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor telah mencapai 12,47 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

**Gambar 3.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota  
Se-Jawa Barat Tahun 2019**



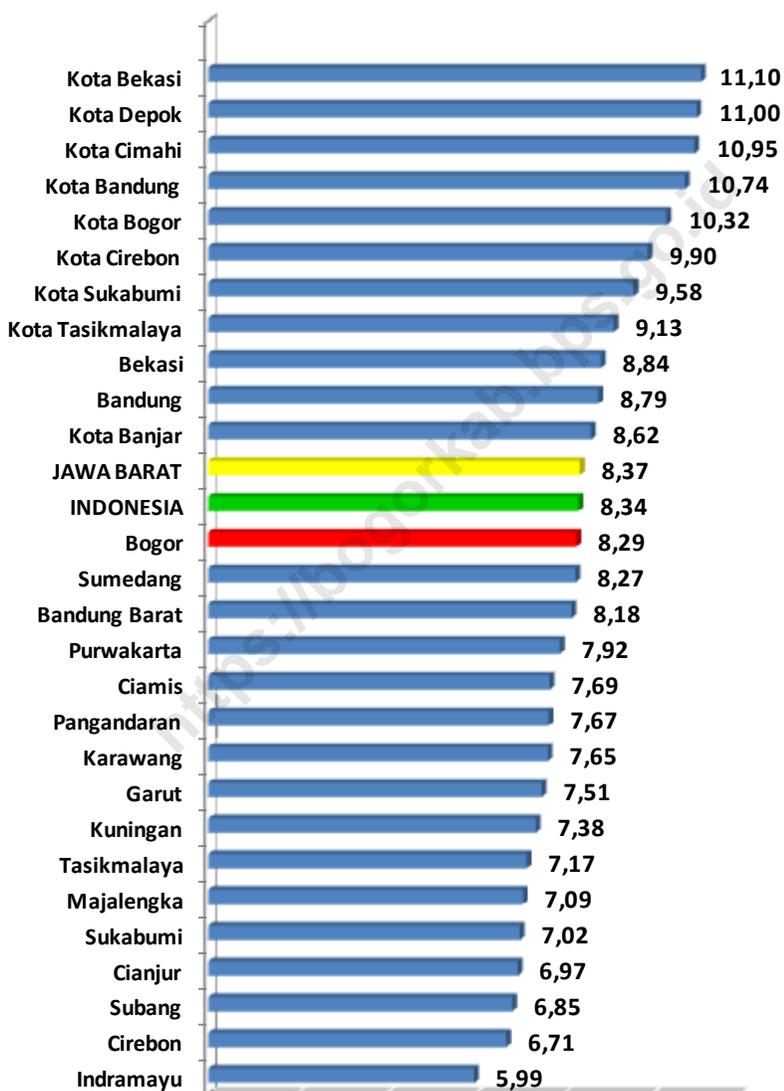
Sumber : IPM 2019

Berdasarkan Gambar 3.2 HLS Kabupaten Bogor tahun 2019 posisinya dibawah Provinsi Jawa Barat dan nasional dan jika dibandingkan menurut Kabupaten/Kota se Jawa Barat , HLS penduduk usia 7 tahun ke atas tertinggi terdapat di Kota Bandung (14,19 tahun), Kota Bekasi (13,99 tahun) dan Kota Depok (13,91 tahun). HLS Kabupaten Bogor tahun 2019 menduduki urutan ke 15 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Seperti tahun sebelumnya, HLS tahun 2019 posisi terendah terdapat di Kabupaten Subang (11,69 tahun), Kabupaten Garut (11,82 tahun), dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 11,86 tahun.

#### **RATA-RATA LAMA SEKOLAH**

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Dari gambar 3.1 diatas, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor terus menunjukkan peningkatan selama periode 2014 hingga 2019. Dari 7,74 di tahun 2014 tumbuh menjadi 8,29 di tahun 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bogor yang lebih baik. Hingga tahun 2019, secara rata-rata penduduk Kabupaten Bogor usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau SMP kelas II. Angka ini tentunya masih jauh dibandingkan target pendidikan dasar yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak beberapa tahun lalu, yaitu program wajib belajar 9 tahun.

**Gambar 3.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota  
Se-Jawa Barat Tahun 2019**



Sumber : IPM, 2019

Sebaran RLS tahun 2019 Kabupaten/kota se Jawa Barat dapat dilihat pada gambar 3.3. Kabupaten Bogor dengan RLS sebesar 8,29 tahun menduduki urutan ke 12 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Pada tahun 2019 peringkat RLS kabupaten Bogor meningkat dibanding tahun sebelumnya yang masih menduduki peringkat 14 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat namun angka RLS Kabupaten Bogor ini masih sedikit berada dibawah Provinsi Jawa Barat dan nasional. RLS Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sebesar 8,37 tahun dan RLS Indonesia sebesar 8,34. RLS tahun 2019 penduduk usia 25 tahun ke atas tertinggi terdapat di Kota Bekasi (11,10 tahun), Kota Depok (11,00 tahun) atau setara dengan jenjang SLTA kelas 11 dan Kota Cimahi (10,95 tahun) atau setara dengan jenjang SLTA kelas 10. Adapun RLS terendah terdapat di Kabupaten Indramayu (5,99 tahun), Cirebon (6,71 tahun) dan Kabupaten Subang (6,85 tahun) atau masih setara dengan pendidikan SD kelas 6.

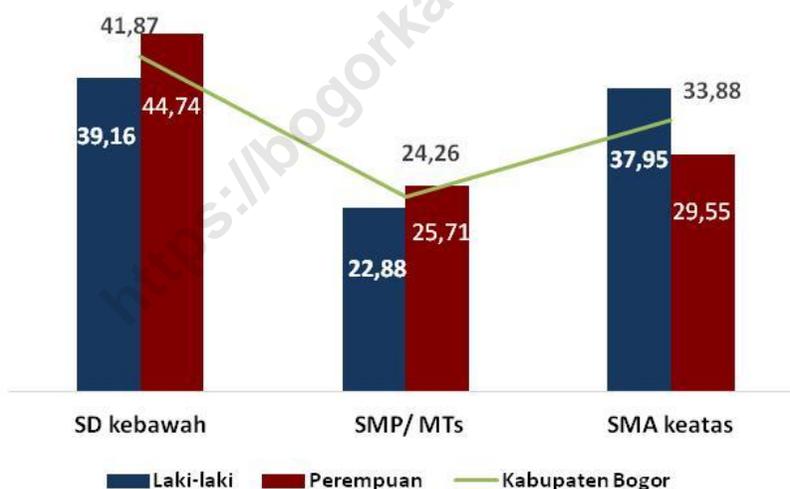
### **3.3 Tingkat Pendidikan**

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan.

Berdasarkan data hasil Susenas 2019, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bogor persentase paling besar yang memiliki ijazah tertinggi adalah ijazah SD/MI atau bisa dikatakan tamat SD/MI kebawah yaitu

sekitar 47,87 persen, kemudian SMP/MTS yaitu sebesar 24,26 persen dan SMA/SMK/MA keatas yaitu sebesar 33,88 persen. Di Kabupaten Bogor penduduk berumur 15 tahun keatas paling banyak memiliki ijazah SD/MI kebawah dimana pada jenis kelamin laki-laki sebesar 39,16 persen dan perempuan mencapai 44,74 persen, Hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah di bidang pendidikan masih harus terus digalakkan demi tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

**Gambar 3.4. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Kabupaten Bogor 2019**

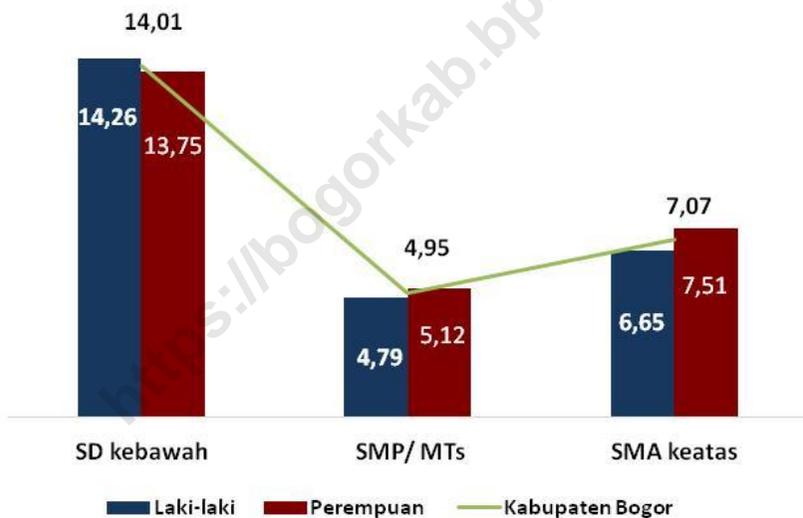


Sumber : Susenas, Maret 2019

Pada tahun 2019 penduduk berumur lima tahun ke atas yang masih sekolah di Kabupaten Bogor persentase terbesar juga pada tingkat setara SD yaitu sebesar 14,01 persen dan yang masih sekolah di tingkat SMP/MTs hanya sebesar 4,95 persen. Sedangkan yang masih bersekolah di tingkat SMA keatas termasuk Diploma/Universitas sebesar 7,07 persen. Pada tahun 2019

penduduk berjenis kelamin perempuan yang masih bersekolah di SMP/MTs maupun SMA keatas persentasenya lebih besar dibanding penduduk laki-laki yang masih bersekolah. Hal ini bisa disebabkan penduduk laki-laki ada kecenderungan lebih banyak yang tidak melanjutkan sekolah untuk mencari pekerjaan.

**Gambar 3.5 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah, Kabupaten Bogor 2019**



Sumber : Susenas, Maret 2019

Jika kita lihat dari tabel 3.2 penduduk yang berumur 7-24 tahun di Kabupaten Bogor yang tidak bersekolah lagi di tahun 2019 sekitar 32,47 persen dan yang sedang menjalani pendidikan mulai dari tingkat SD sampai diploma/Perguruan Tinggi sebesar 67,17 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki usia 7-24 tahun yang statusnya

masih bersekolah (67,36 persen) sedikit lebih tinggi dari penduduk perempuan usia 7-24 tahun (66,97 persen). Penduduk usia 7-24 tahun baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Bogor masih didominasi oleh anak yang sedang bersekolah SD/ MI.

**Tabel 3.2 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun  
Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan, Kabupaten Bogor 2019**

Jenis Kelamin	Tidak/belum pernah bersekolah	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA katas	Tidak Bersekolah lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	0,69	36,62	12,86	17,88	31,95	100,00
Perempuan	0,00	34,23	13,66	19,08	33,02	100,00
Kabupaten Bogor	0,35	35,46	13,25	18,46	32,47	100,00

Sumber : Susenas, Maret 2019

# 4 Ketenagakerjaan

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2018, dan 2019 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja

menurut lapangan usaha, serta persentase pekerja menurut sektor formal informal.

Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbesar (4.771.932 jiwa pada Mei tahun 2010) dibandingkan kabupaten/kota se-Indonesia. Besarnya jumlah penduduk berpengaruh pada jumlah penduduk usia kerja yang besar, yang tentunya juga berpengaruh dengan jumlah angkatan kerja yang besar. Hal ini menuntut pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan usaha seluas-luasnya agar tidak menimbulkan jumlah pengangguran yang besar, yang secara ekonomi tentu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dipandang dari sudut pembangunan ekonomi, penduduk adalah sumber daya tenaga kerja yang sangat potensial untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tenaga potensial dimaksud adalah mereka yang berada pada kondisi 'usia kerja'. Penduduk usia kerja berpeluang besar melakukan kegiatan ekonomi di pasar kerja. Dengan kata lain, penduduk yang berada pada usia kerja merupakan usia produktif dalam menghasilkan output produksi. Tenaga kerja merupakan modal utama bagi bergeraknya roda perekonomian. Disamping sebagai salah satu faktor produksi yang memperoleh upah/gaji, tenaga kerja juga merupakan konsumen berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha. Konsumsi rumah tangga ini pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan nilai PDRB, sehingga penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat merupakan suatu prasyarat yang mutlak harus dipenuhi jika suatu daerah ingin mempercepat pertumbuhan ekonominya.

Dalam subbab ketenakerjaan ini, disajikan gambaran/kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Bogor tahun 2018 yang datanya bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas ) bulan Agustus 2017 dan 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

#### **4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja di Kabupaten Bogor Agustus 2019 sebanyak 4,27 juta orang. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja,

atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2019 mencapai 2,79 juta orang.

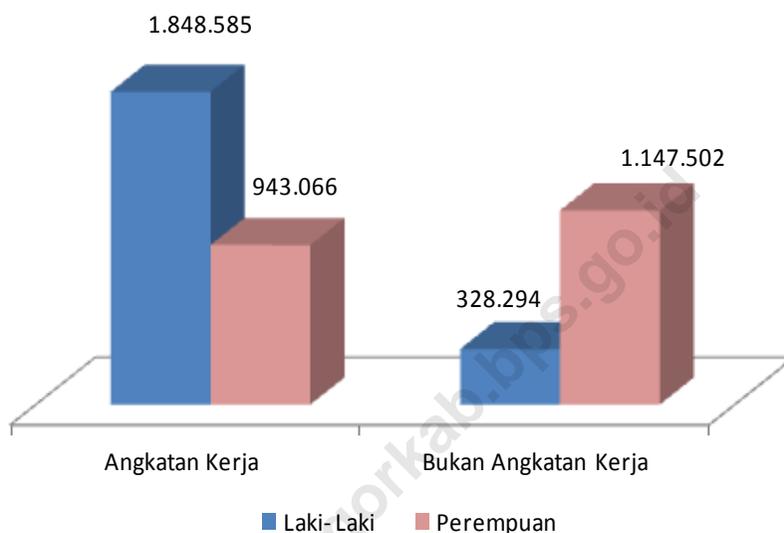
**Tabel 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Bogor, Agustus 2018 – 2019**

Keterangan	2018		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>2.611.465</b>	<b>62,71</b>	<b>2.791.651</b>	<b>65,42</b>
Bekerja	2.356.875	90,25	2.538.637	90,94
- Menganggur	254.590	9,75	253.014	9,06
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>1.552.680</b>	<b>37,29</b>	<b>1.475.796</b>	<b>34,58</b>
- Sekolah	341.220	21,98	298.689	20,24
- Mengurus Rumah Tangga	1.049.651	67,60	1.006.299	68,19
- Lainnya	161.809	10,42	170.808	11,57
<b>Jumlah Penduduk Usia Kerja</b>	<b>4.164.145</b>	<b>100,00</b>	<b>4.267.447</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sakernas Agustus 2019

Dari total angkatan kerja sebanyak 2,79 juta orang pada Agustus 2019, sebanyak 90,94 persennya melakukan aktivitas bekerja. Jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2019 mencapai 2,54 juta orang meningkat sekitar 7,71 persen dari keadaan Agustus 2018. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

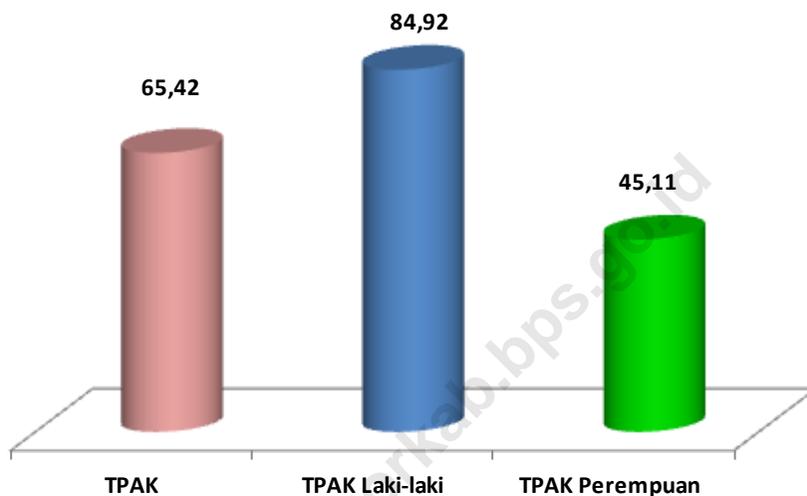
**Gambar 4.1 Komposisi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2019**



Sumber : Sakernas Agustus 2019

Hasil Sakernas 2019 memperlihatkan jumlah angkatan kerja Kabupaten Bogor mencapai 2.791.651 orang dengan komposisi laki-laki 1.848.565 orang dan perempuan 934.066 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa penduduk yang mengakses dunia kerja, baik dalam kondisi bekerja maupun mencari pekerjaan didominasi oleh penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki yang masuk dalam angkatan kerja dua setengah lebih banyak dibandingkan perempuan. Komposisi penduduk laki-laki sebagai angkatan kerja sebanyak 66,22 persen, sedangkan penduduk perempuan hanya berkontribusi sebanyak 33,78 persen (gambar 4.1).

**Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, Agustus 2019**



Sumber : Sakernas Agustus 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) total Kabupaten Bogor tahun 2018 sebesar 65,42 persen artinya 65,42 persen dari penduduk usia kerja di Kabupaten Bogor terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif menghasilkan barang dan jasa. TPAK tahun 2019 (65,42%) mengalami peningkatan jika dibandingkan TPAK tahun 2018 (62,71%). Dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki (84,92%) lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan sebesar 45,11 persen (Gambar 4.2).

Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Kabupaten Bogor tahun 2019 masih sangat rendah. Persentase tertinggi (38,17 %) penduduk yang bekerja di Kabupaten Bogor berpendidikan SD ke bawah. Proporsi penduduk yang bekerja dengan pendidikan SD ke bawah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 (36,09 %). Kenaikan ini disebabkan

adanya kenaikan jumlah penduduk bekerja yang cukup tinggi di kabupaten Bogor pada tahun 2019 yaitu meningkat hingga 7,71 persen dibanding tahun sebelumnya.

**Gambar 4.3 Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kabupaten Bogor 2019**

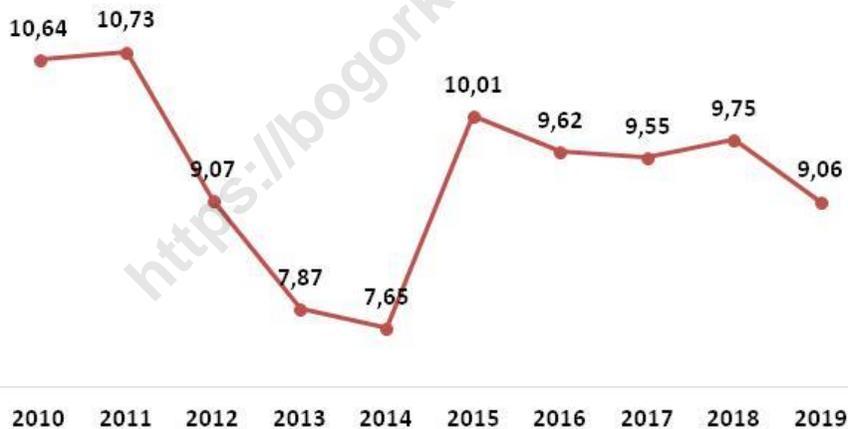


Sumber : Sakernas Agustus 2019

Berbeda dengan pekerja dengan pendidikan SD kebawah, pekerja dengan pendidikan SMP dan SLTA sebaliknya mengalami penurunan dari tahun 2018, dengan pekerja pendidikan SMP pada tahun 2018 sebesar 20,92 persen turun menjadi 17,50 persen pada tahun 2019 dan pekerja pendidikan SLTA tahun 2018 sebesar 35,05 persen turun menjadi 34,50 persen pada tahun 2019 hal ini menunjukkan adanya penurunan kualifikasi pekerja

penduduk Bogor. Namun ada berita baik, untuk pekerja dengan pendidikan perguruan Tinggi dikabupaten Bogor mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 9,83 persen dimana sebelumnya hanya 7,93 persen. Peningkatan jumlah pekerja berpendidikan perguruan tinggi ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pekerja karena jenis pekerjaan akan sesuai dengan bidang dan kemampuannya (Gambar 4.3).

**Gambar 4.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Tahun 2010-2019**



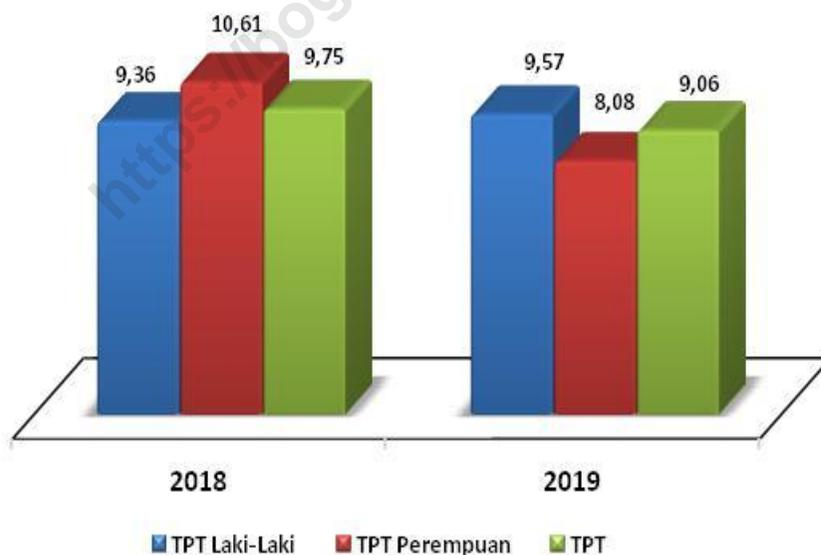
Sumber : Sakernas Agustus 2010-2019

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bogor keadaan Agustus 2019 sebesar 9,06 persen menurun jika dibandingkan keadaan Agustus 2018 yang mencapai sebesar 9,75 persen. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu

usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT Kabupaten Bogor tahun 2019 (9,06%) menurun dibandingkan TPT tahun 2018 (9,75 %). Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi daripada TPT perempuan pada kondisi Agustus 2019, yaitu masing-masing 9,57 persen dan 8,08 persen. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya, TPT laki-laki lebih rendah daripada TPT perempuan.

**Gambar 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, Agustus 2018 dan 2019**



Sumber : Sakernas Agustus 2019

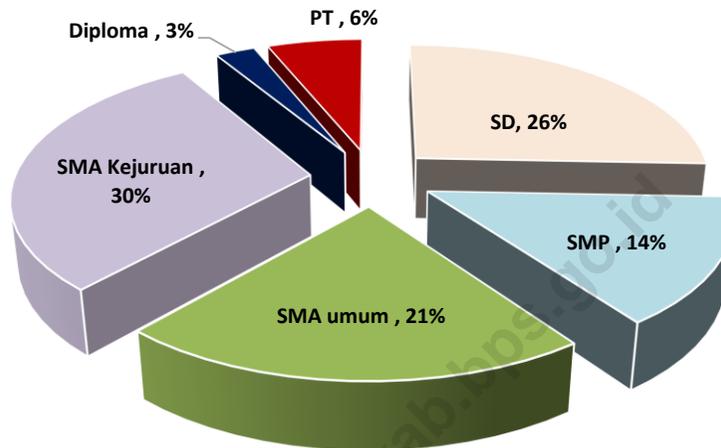
Selama periode Agustus 2018 hingga Agustus 2019 tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami peningkatan. Keadaan Agustus 2018 TPT laki-laki mencapai 9,36 persen, kemudian meningkat 0,21 persen menjadi 9,57 persen pada Agustus 2019. Adapun TPT perempuan, dimana pada keadaan Agustus 2018 mencapai 10,63 persen turun 2,53 persen menjadi 8,08 persen pada keadaan Agustus 2019.

#### **4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan**

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor yang paling banyak adalah berijazah SMK Kejuruan, yaitu mencapai 30 persen. Untuk yang berpendidikan SLTP, Persentase TPT nya sebesar 14 persen, tamat SD dan pendidikan dibawah SD (tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD) sebesar 26 persen. Dan sebesar 6 persen dari mereka yang menganggur pernah mengecap pendidikan di Perguruan Tinggi (gambar 4.6)

**Gambar 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Bogor, Agustus 2019**



*Sumber : Sakernas Agustus 2019*

Tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SLTA merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, agar potensi yang dimiliki dapat berkontribusi dalam pembangunan. Dengan pembukaan lapangan kerja baru akan menurunkan angka urbanisasi di daerah masing-masing dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja dapat berpartisipasi dengan berwirausaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwirausaha.

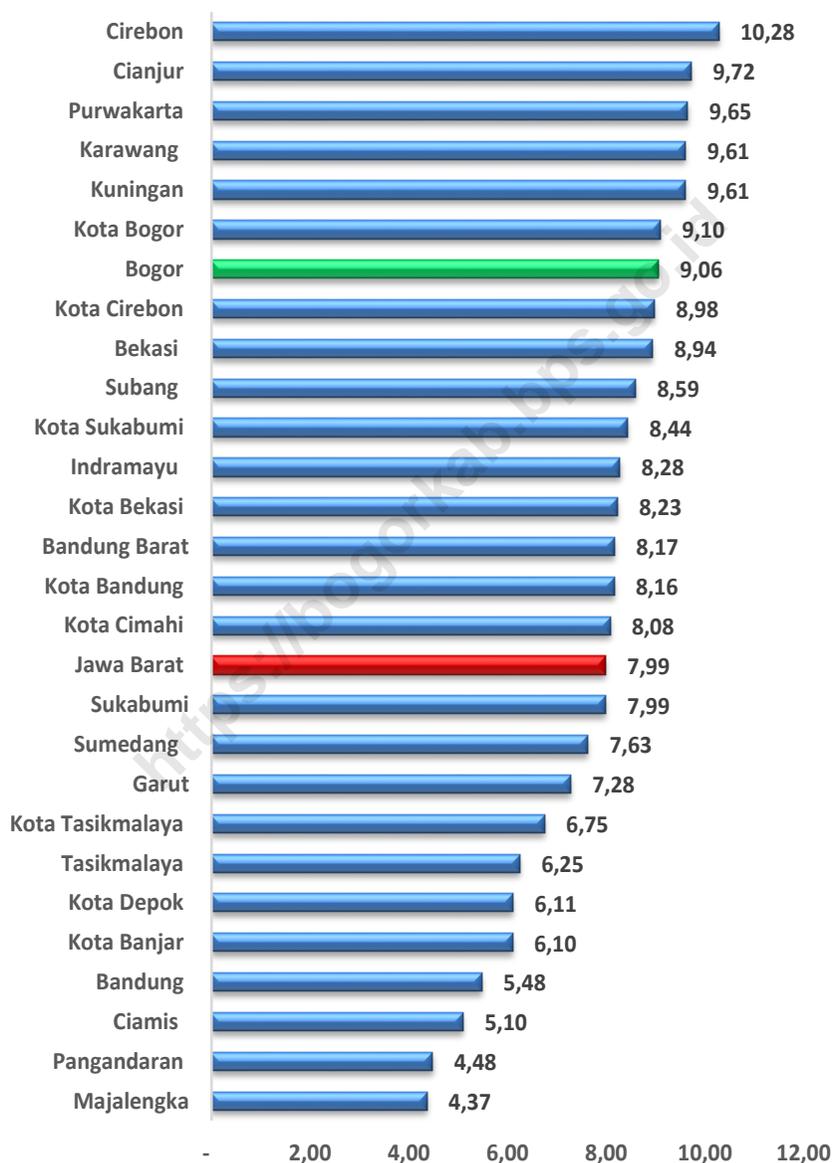
**Gambar 4.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor, Agustus 2015 – 2019**



Sumber : Sakernas Agustus 2015, 2017 dan 2019

Bila dilihat dari daerah tempat tinggalnya, penduduk yang menganggur lebih banyak di daerah perkotaan daripada di perdesaan. Jumlah pengangguran di perkotaan keadaan Agustus 2019 mencapai 224.595 ribu orang, sedangkan di perdesaan mencapai 28.419 ribu orang. Cukup tingginya tingkat pengangguran di perkotaan menunjukkan lapangan kerja yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar. Hal ini terkait dengan lapangan kerja yang terbatas dan adanya penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Sebagian besar tenaga kerja di perdesaan terserap di sektor pertanian, karena memberikan kesempatan kerja yang lebih luas. Tingginya tingkat pengangguran di perkotaan juga disebabkan urbanisasi yang terjadi sehingga banyak angkatan kerja yang tadinya berada di perdesaan yang pindah ke wilayah perkotaan.

**Gambar 4.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, Agustus 2019**



Sumber: Sakernas Agustus 2019

Di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Cianjur diurutan ke dua dan berikutnya kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, dan kabupaten Bogor jatuh pada urutan ke 7. Kabupaten Majalengka dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,37 merupakan kabupaten paling kecil angka TPTnya, setelah itu kabupaten Pangandaran dan diikuti kabupaten Ciamis.

Penduduk Kabupaten Bogor banyak yang bekerja di kabupaten/kota tetangga seperti Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan di Wilayah DKI Jakarta. Mereka yang bekerja di luar kabupaten Bogor banyak yang dilakukan secara ulang alik (*commuter*) dan ada pula yang tinggal sementara.

TPT Kabupaten Bogor tahun 2019 (9,06%) menurun dibandingkan TPT tahun 2018 (9,75%), namun nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat (7,99%) maupun TPT Nasional di bulan Agustus (5,28%). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 9,06% menunjukkan terdapat 9 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Bogor oleh karena tingginya TPT tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor harus terus memacu laju penyerapan tenaga kerja untuk dapat menurunkan angka pengangguran dan menurunkan kemiskinan.

Dilihat menurut kabupaten/kota, tingkat pengangguran terendah tahun 2019 berada di Kabupaten Majalengka dengan pengangguran sebesar 4,37 persen, diikuti oleh Kabupaten Pangandaran 4,48 persen dan Kabupaten Ciamis sebesar 5,10 persen. Angka pengangguran tertinggi di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 terdapat di Kabupaten Cirebon (10,28%) kemudian Kota Cianjur (9,72%) dan Kabupaten Purwakarta (9,65%).

### 4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Tahun 2019 distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 lapangan usaha yaitu pertanian, industri dan jasa. Dari 3 lapangan usaha tersebut, persentase jumlah penduduk yang bekerja terbanyak di Kabupaten Bogor adalah lapangan usaha jasa yaitu mencapai 63,4 persen dan di urutan ke dua adalah lapangan usaha industri 29,65 persen dan paling sedikit adalah lapangan usaha pertanian hanya 6,95 persen.

**Tabel 4.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kabupaten Bogor, Agustus 2019**

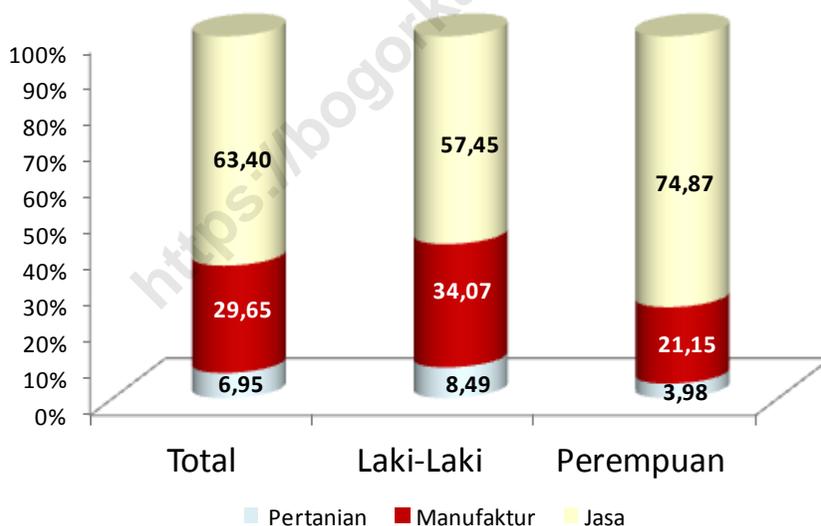
Lapangan Usaha	2019	
	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
1 Pertanian	176.399	6,95
2 Industri	752.827	29,65
3 Jasa	1.609.411	63,40
Jumlah	2.538.637	100,00

Sumber : Sakernas Agustus 2019

Besarnya jumlah penduduk yang bekerja di lapangan usaha jasa hingga mencapai 63,4 persen dari seluruh pekerja yang ada di kabupaten Bogor tersebut karena lapangan usaha ini cakupannya sangat luas yaitu makanan dan minuman, hotel, jasa keuangan, ifokom, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya. Begitu juga dengan industri yang persentasenya mencapai 29,65 persen ini mencakup 16 subkategori di seluruh industri pengolahan dari industri makanan dan minuman, industri

tekstil, industri kertas, industri kayu, industri barang dari bukan logam, industri barang dari logam maupun nonlogam serta industri pengolahan lainnya yang banyak berdiri di kabupaten Bogor. Sedangkan untuk lapangan usaha pertanian persentase jumlah penduduk yang bekerja paling kecil hanya 6,95 persen, hal ini karena cakupannya hanya di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan saja sehingga penyerapan tenaga kerjanya tidak seluas lapangan usaha industri maupun jasa.

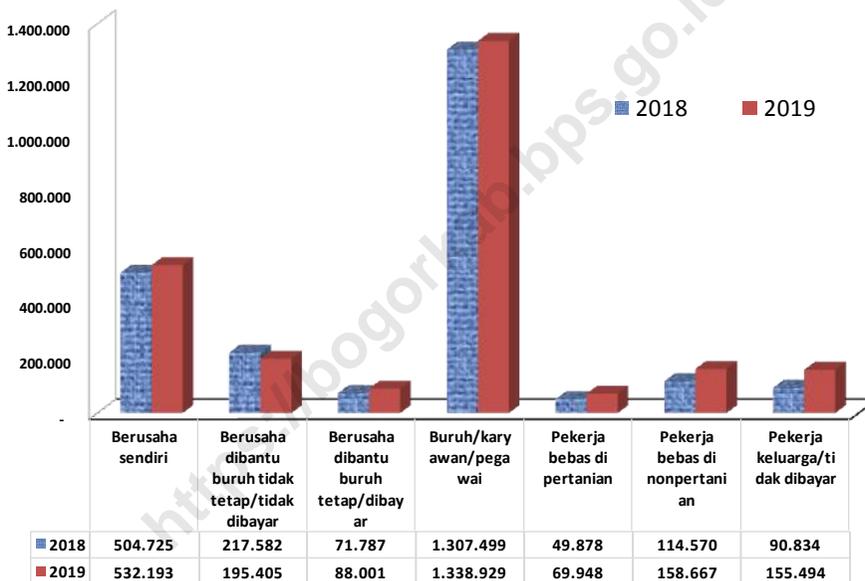
**Gambar 4.9 Struktur Lapangan Usaha Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, Agustus 2019**



Struktur penduduk yang bekerja di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 secara umum memperlihatkan adanya peralihan struktur ketenagakerjaan dari sektor pertanian (*agriculture*) ke sektor industri (*manufacture*) dan sektor jasa. Dari gambar 4.9 terlihat baik perkerja laki-laki maupun perempuan lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja

terbesar berasal dari sektor jasa. Keadaan Agustus 2019 lapangan kerja jasa mampu menyerap tenaga kerja perempuan sebesar 74,87 persen dan tenaga kerja laki-laki sebesar 57,45 persen di kabupaten Bogor.

**Gambar 4.10 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bogor, Agustus 2018 dan 2019**

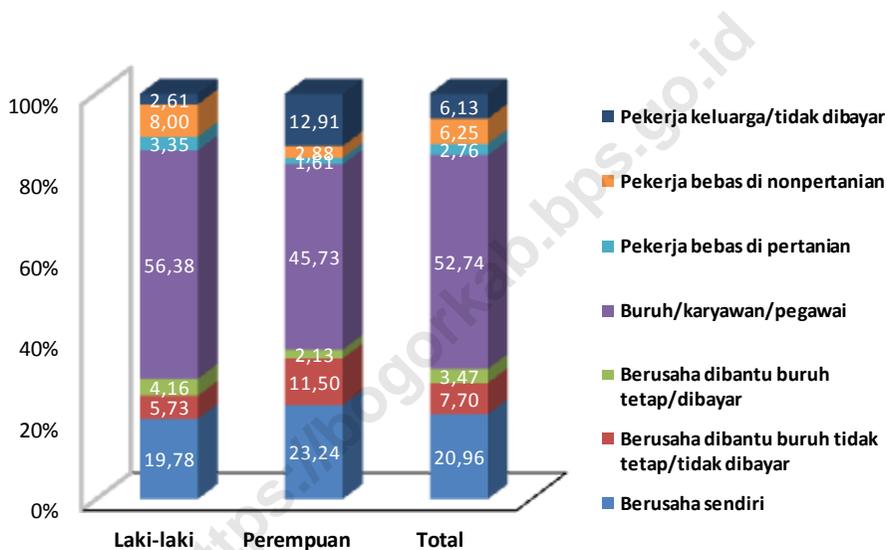


Sumber : Sakernas Agustus 2018-2019

Selama periode Agustus 2018 hingga Agustus 2019 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada Agustus 2019 mencapai 1,34 juta orang atau sebesar 52,74 persen. Jika dibandingkan dengan Agustus 2018 jumlah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utamanya mengalami peningkatan, kecuali yang berstatus

sebagai pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

**Gambar 4.11 Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja Menurut Jenis kelamin di Kabupaten Bogor, Agustus 2019**



Sumber : Sakernas Agustus 2019

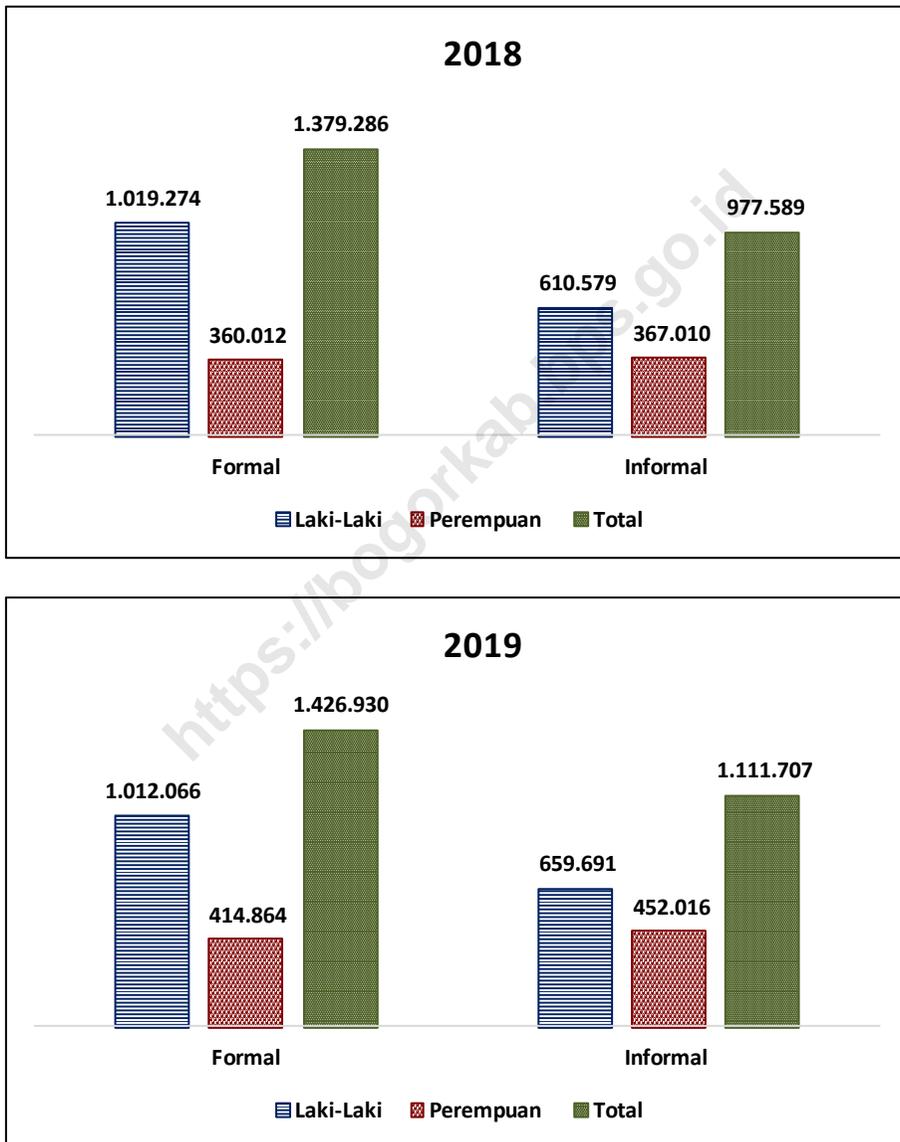
Dari hasil Sakernas Agustus 2019 di kabupaten Bogor, baik untuk pekerja laki-laki maupun perempuan status pekerjaan utama bagi penduduk yang bekerja terbanyaknya adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai. Struktur penduduk laki-laki yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 56,38 persen, sedangkan penduduk perempuannya lebih kecil persentasenya yaitu sebesar 45,73 persen. Terbanyak kedua status bekerja baik pekerja laki laki maupun perempuan pada status bekerjanya berusaha sendiri.

#### 4.4 Sektor Formal dan Sektor Informal

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*). ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai “karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)”. Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) usaha sendiri informal dan (2) pekerjaan upahan informal yang dipekerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Buku Pedoman Pencacah Survei Sektor Informal 2014, BPS).

**Gambar 4.12 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal dan Informal di Kabupaten Bogor, Agustus 2018 dan 2019**



Sumber : Sakernas Agustus 2018 dan 2019

Penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja pada sektor formal keadaan tahun 2019 mencapai 1,43 orang (56,21 persen), sedang yang informal hanya 43,79 persen dari penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja . Dibanding tahun sebelumnya, terjadi peningkatan pada jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal maupun informal. Apabila kita melihat perbedaan penduduk yang bekerja berdasarkan jenis kelamin, terlihat pada keadaan Agustus 2019 penduduk laki-laki (60,54 persen) lebih banyak yang bekerja di sektor formal dan hanya 39,46 persen yang bekerja di informal. Sebaliknya penduduk perempuan lebih banyak di sektor informal (52,14 persen) dan hanya 47,86 persen yang bekerja di sektor formal. Hal ini dikarenakan karena perempuan kebanyakan bekerja bukan sebagai tulang punggung keluarga sehingga dalam mencari pekerjaan berusaha yang tetap bisa mengurus keluarganya dan yang paling memungkinkan di sektor informal.

# 5 Perumahan dan Lingkungan

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu rumah juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

### 5.1. Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Data hasil Susenas 2017, di kabupaten Bogor rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 98,69 persen. Di tahun 2018 dan 2019 untuk luas lantai berlantai tanah tidak ditanyakan dalam Susenas.

Selain luas lantai, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Berdasarkan Susenas tahun 2019 untuk rumah tangga di Kabupaten Bogor dimana rumah tinggalnya dengan atap beton, genteng, dan asbes sudah lebih baik yaitu mencapai 98,22 persen. Kondisi yang sama terjadi pada bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu di kabupaten Bogor mencapai 94,90 persen pada tahun 2019.

**Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas, Kabupaten Bogor 2018 dan 2019**

Tahun	Beton	Genteng	Asbes	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	3,47	71,03	24,65	0,85	100,00
2019	3,45	70,98	23,79	1,78	100,00

Sumber : Susenas, 2018-2019

**Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas, Kabupaten Bogor 2018 dan 2019**

Tahun	Tembok	Plesteran anyaman bambu/kawat	Kayu/Batang kayu	Bambu / Anyaman Bambu	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	95,14	1,00	0,62	2,20	1,03	100,00
2019	94,49	1,12	0,41	2,57	1,40	100,00

Sumber : Susenas, 2018-2019

Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Berkaitan dengan kriteria WHO tersebut, menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m<sup>2</sup> dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup>. Disamping tingkat derajat kesehatan penghuninya, luas lantai juga sering dianggap sebagai gambaran tingkat kesejahteraan/status sosial penghuninya. Semakin luas lantai yang dimiliki oleh suatu rumahtangga maka asumsinya semakin sehat dan sejahtera penghuninya.

Data hasil Susenas tahun 2019 menunjukkan bahwa di Kabupaten Bogor persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita

$\geq 10 \text{ m}^2$  adalah sebesar 78,44 persen. Jika dibandingkan dengan data susenas tahun 2018, maka terjadi penurunan persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita  $\geq 10 \text{ m}^2$  sebesar 1,19 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk tidak sesuai dengan peningkatan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh rumah yang lebih memadai dengan banyaknya anggota rumah tangga.

**Tabel 5.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Perkapita ( $\text{m}^2$ ), Kabupaten Bogor 2018 dan 2019**

Tahun	$\leq 7,2 \text{ m}^2$	7,3-9,9 $\text{m}^2$	10+ $\text{m}^2$	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	10,69	9,67	79,63	100,00
2019	8,57	12,99	78,44	100,00

Sumber : Susenas, 2018-2019

## 5.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum

dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

**Tabel 5.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan 2019**

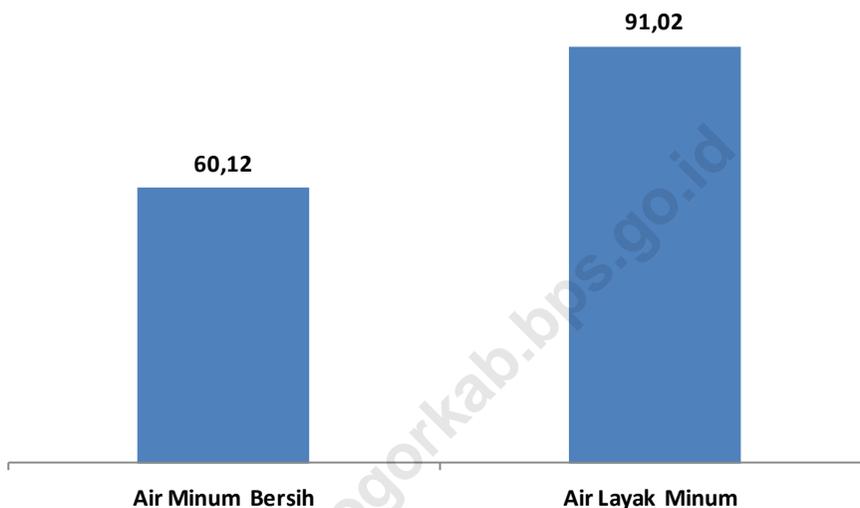
Tahun	Air Kemasan/Air Isi Ulang	Ledeng/Meteran/Eceran	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung/Tidak Terlindung	Mata Air Terlindung/Tidak Terlindung	Air Permukaan/Air Hujan/Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2018	27,7	4,84	18,79	39,83	8,36	0,48	100
2019	46,01	5,94	18,38	19,48	9,85	0,34	100

Sumber : Susenas, 2018 dan 2019

Menurut data Susenas 2019, rumah tangga di Kabupaten Bogor tahun 2019 yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum mencapai 51,95 persen ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya 32,54 persen penduduk yang sumber air minumnya menggunakan air kemasan, air isi ulang dan air ledeng. Namun masih ada sekitar 0,38 persen rumah tangga yang masih mengonsumsi air permukaan/air hujan sebagai sumber air minum.

Selanjutnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2019 mencapai lebih dari 50 persen, yaitu sebesar 60,12 persen. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 m.

**Gambar 5.1. Proporsi Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak, Kabupaten Bogor 2019**



Sumber : Susenas, 2019

Selain fasilitas ketersediaan air minum, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

**Tabel 5.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Ketersediaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan 2019**

Indikator	Satuan	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Jamban sendiri	%	82,39	80,65
Jamban sendiri dengan septi tank	%	64,88	67,98

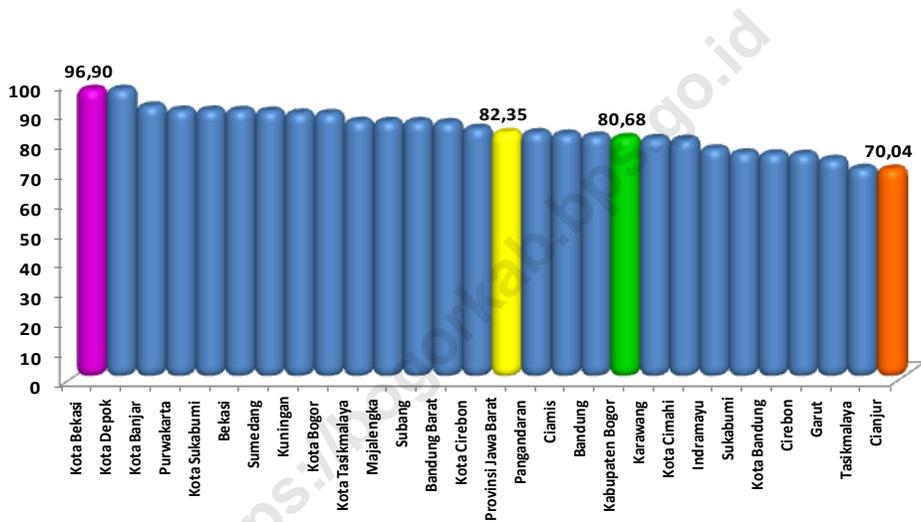
Sumber : Susenas, 2018 dan 2019

Selama tahun 2018-2019 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri berada dikisaran 80 persen lebih. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Selanjutnya selain telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2018 rumah tangga di Kabupaten Bogor yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 67,98 persen.

Persentase kepemilikan jamban sendiri dapat dilihat per Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Barat seperti disajikan pada Gambar 5.2. Rumah tangga di Kabupaten Cianjur paling sedikit di provinsi Jawa Barat yang memiliki jamban sendiri yaitu hanya sekitar 70,04 persen. Persentase ini jauh di bawah persentase Provinsi Jawa Barat yang mencapai 82,35 persen. Sementara di Kabupaten Bogor tercatat rumah tangga yang memiliki jamban

sendiri jumlahnya lebih sedikit dari persentase Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 80,68 persen. Kota Bekasi memiliki persentase rumah tangga terbanyak yang memiliki jamban sendiri yaitu sebesar 96,90 persen.

**Gambar 5.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Sendiri (%), di Jawa Barat, 2019**



Sumber : Susenas, 2019

### 5.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

**Tabel 5.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal, Kabupaten Bogor 2019**

Karakteristik	Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati		Total
	Milik sendiri	Lainnya	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Laki-laki	80,04	19,96	100,00
Perempuan	85,64	14,36	100,00
40 persen bawah	81,36	18,64	100,00
40 persen menengah	81,12	18,88	100,00
20 persen atas	79,20	20,80	100,00
<b>Total</b>	<b>80,75</b>	<b>19,25</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Susenas, 2019

Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 80,75 persen, sisanya 19,25 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri tersebut diantaranya ada yang kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya.

# 6 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh

adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkat kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda

pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

Menurut jenisnya, data kemiskinan dikategorikan dalam dua jenis, yaitu data makro dan data mikro. Data makro kemiskinan pada dasarnya adalah angka estimasi penduduk miskin untuk tingkat nasional maupun daerah (sampai pada tingkat kabupaten/kota). Data kemiskinan makro digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara makro yang dapat digunakan antara lain untuk: 1) Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin, *poverty gap*, dan *severity index* (absolute); dan 2) Mengetahui ketimpangan/disparitas akses antar golongan masyarakat: urban/rural, kelompok pendapatan *Quintile* (relative). Data makro kemiskinan biasanya digunakan untuk alokasi anggaran pengentasan kemiskinan menurut daerah.

Keunggulan data makro kemiskinan adalah dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dengan berbagai karakteristiknya dari waktu ke waktu berikutnya (*time series*). Dengan demikian, perencanaan penurunan tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan dalam bidang lainnya seperti perencanaan tingkat pertumbuhan, investasi dan peningkatan kesempatan kerja.

Kelemahan data makro adalah tidak dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/alamat mereka, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan program-program pembangunan yang

bersifat langsung ditujukan kepada masyarakat miskin (*targeting*), terutama untuk program-program yang ditujukan untuk memenuhi akses terhadap pelayanan dasar (kemiskinan non pendapatan). Untuk kebutuhan sasaran program, pemerintah pernah melakukan pengumpulan data mikro terkait dengan kemiskinan yaitu melakukan pendataan rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, pendataan PPLS tahun 2011 dan terakhir Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015. Hasil pendataan tersebut diserahkan ke TNP2K untuk keperluan program percepatan pengentasan kemiskinan. Data Mikro Kemiskinan tersebut sudah dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/alamat mereka.

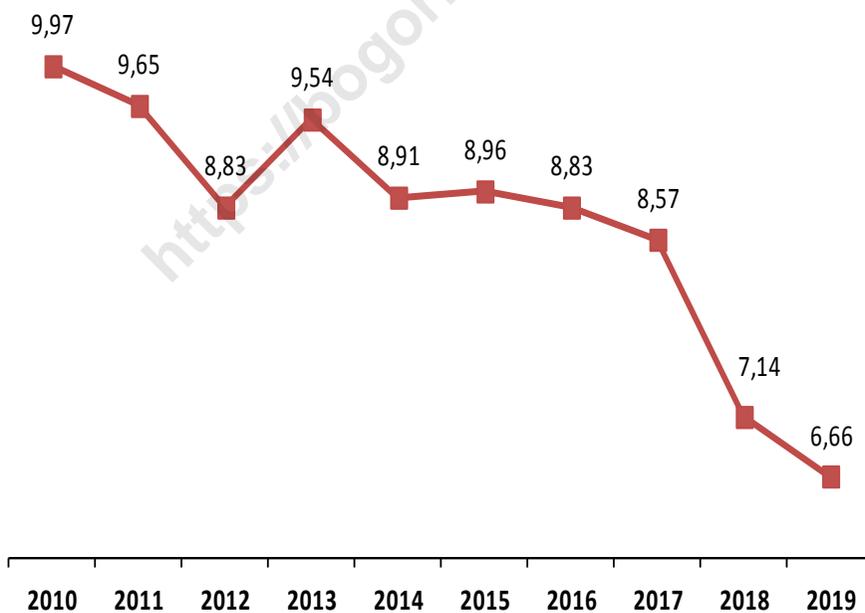
Dalam sub bab ini data kemiskinan yang akan disajikan adalah data makro yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Angka kemiskinan tahun 2018 yang disajikan dalam publikasi ini berdasarkan Survei Sosial Nasional di bulan Maret 2018.

## **6.1 Perkembangan Penduduk Miskin**

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

Penduduk miskin di Kabupaten Bogor secara persentase berfluktuatif nilainya akan tetapi menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2010-2019. Tahun 2010, jumlah penduduk miskin sebesar 477,1 ribu jiwa atau 9,97 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Bogor. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan hingga pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menjadi 410,1 ribu jiwa atau 6,66 persen dari jumlah penduduk.

**Gambar 6.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bogor, 2010-2019**



Sumber : BPS

**Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Kabupaten Bogor Tahun 2010-2019**

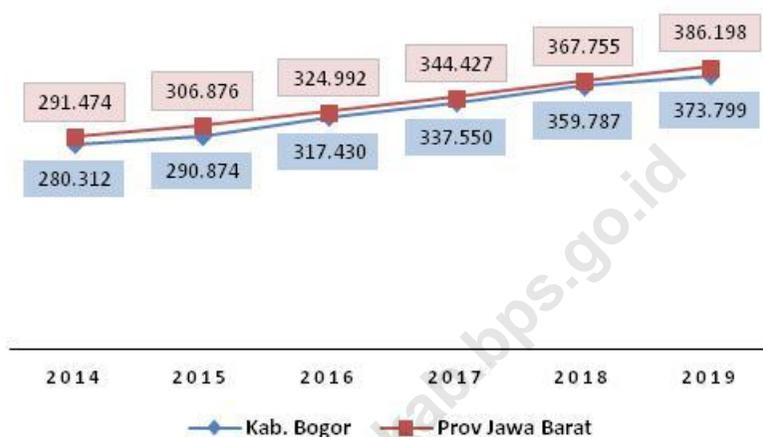
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase (%)	Perubahan Persentase Penduduk miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	477,1	9,97	-0,84
2011	470,5	9,65	-0,32
2012	451,0	8,83	-0,82
2013	499,1	9,54	0,71
2014	479,1	8,91	-0,63
2015	487,1	8,96	0,05
2016	490,8	8,83	-0,13
2017	487,3	8,57	-0,26
2018	415,0	7,14	-1,43
2019	410,1	6,66	-0,48

Sumber : BPS

## 6.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Bogor mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2014-2019, tahun 2014 sebesar Rp 280.312 dan di tahun 2019 sebesar Rp 373.799. Garis kemiskinan Kabupaten Bogor sedikit berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Gambar 6.2).

**Gambar 6.2** Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor, 2014 - 2019 (Rupiah)



Sumber : BPS

Analisis tren tingkat kemiskinan tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan. Nilai garis kemiskinan cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi/deflasi, dimana harga barang kebutuhan yang menjadi basket komoditas kemiskinan yang mengalami inflasi/deflasi. Pada periode 2014 hingga 2019 peningkatan nilai garis kemiskinan berkisar antara 3 hingga 10 persen per tahunnya. Tahun 2019 garis kemiskinan sebesar Rp. 373.799,- per kapita per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 3,89 persen dibandingkan tahun 2018 yakni Rp. 359.787,- per kapita per bulan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman

kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2014 – 2019 di kabupaten Bogor P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2014 sebesar 1,27, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 1,58 dan pada tahun 2016 kembali turun menjadi 1,31 , tahun 2017 nilai P1 menjadi 1,35, selanjutnya di tahun 2018 nilai P1 sebesar 1,12 dan pada tahun 2019 nilai P1 sebesar 0,82.

**Gambar 6.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bogor,**



Sumber : BPS

Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin. Dari gambar 6.3

menggambarkan bahwa Indeks kedalaman kemiskinan (P1) selama 5 tahun dari 1,27 (tahun 2014) menjadi 0,82 (tahun 2019) menunjukkan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil atau rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Indeks kedalaman (P1) Kabupaten Bogor tahun 2019 sebesar 0,82 atau berada di bawah dari indeks kedalaman (P1) Provinsi Jawa Barat (1,09).

**Gambar 6.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Bogor,**



Sumber : BPS

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 jika dibandingkan 2014, mengalami peningkatan sebesar 0.17 poin. Kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan. Di tahun 2017 P2 kembali meningkat. selanjutnya di

tahun 2018 nilainya turun menjadi 0,26 dan kembali turun lagi di tahun 2019 dengan nilai 0,15. Penurunan nilai indeks keparahan ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bogor di tahun 2019 sebesar 0,15 berada dibawah indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat (0,24). Beda dengan 3 tahun sebelumnya tahun 2015 nilai P2 Kabupaten Bogor (0,46) berada diatas Provinsi Jawa Barat (0,43) (gambar 6.4).

### **6.3 Fasilitas yang Diterima Rumah Tangga Miskin**

Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya untuk rakyat miskin, banyak memberikan fasilitas-fasilitas demi meringankan beban rumah tangga miskin, di antaranya pemberian bantuan tunai, subsidi beras murah Raskin (Beras Miskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dapat digunakan untuk berobat.

Beras murah/raskin adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin berupa pendistribusian beras khusus kepada keluarga miskin yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah. Tahun 2019 rumah tangga yang menerima /membeli beras miskin (raskin) /beras Sejahtera (Rastra)/ BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Bogor mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 8,07 persen dari tahun sebelumnya sebesar 27,01 persen. Penurunan ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin di

kabupaten Bogor yang juga turun dari 7,14 Persen di tahun 2018 menjadi sebesar 6,66 Persen di tahun 2019.

**Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan 2019**

Uraian	Persentase Rumah Tangga	
	2018	2019
(1)	(2)	(2)
Penerima Raskin/Rastra/BPNT	27,01	8,07
Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)	6,83	6,87
Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	7,05	5,32
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	6,77	7,43

Sumber : Susenas 2019

Persentase rumah tangga yang menerima Program Indonesia Pintar pada Bulan Agustus 2019 di Kabupaten Bogor sebesar 6,87 persen sedikit mengalami peningkatan dari tahun yang sebesar 6,83 persen. Rata-rata Program Indonesia Pintar yang diterima pada rumahtangga sebesar Rp. 764.884 yang diberikan dalam bentuk BSM (Bantuan Siswa Miskin). BSM yang dimaksud adalah bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan yang berasal dari ruta miskin dan rentan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Program BSM, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementrian Agama (Kemenag). Sementara untuk penerima kartu perlindungan sosial/Kartu Keluarga Sejahtera dan

penerima Keluarga Harapan di Kabupaten Bogor di tahun 2019 masing-masing sebesar 5,32 persen dan 7,43 persen rumah tangga.

Jaminan kesehatan adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pada tahun 2019 menurut hasil Susenas 2019 di Kabupaten Bogor, jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan hanya sekitar 40,14 persen, sedangkan sisanya 59,88 persen belum menggunakan jaminan kesehatan.

**Tabel 6.3. Persentase Penduduk Menurut Apakah Menggunakan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bogor, 2019**

Karakteristik	Apakah menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan?		Total
	tidak menggunakan	menggunakan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	60,56	39,44	100,00
Perempuan	59,22	40,78	100,00
40 persen bawah	68,40	31,60	100,00
40 persen menengah	55,30	44,70	100,00
20 persen atas	48,23	51,77	100,00
<b>Total</b>	<b>59,86</b>	<b>40,14</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Susenas 2019

# 7 Sosial Lainnya

Pada Bab ini akan diuraikan beberapa data sosial lainnya yang merupakan pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor. Cakupan pembahasan meliputi data Perjalanan Wisata Penduduk, Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis serta Korban Tindak Kejahatan.

Pengertian perjalanan wisata yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin. Selanjutnya akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Harga telepon pintar yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Pelayanan kesehatan gratis tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya.

### 7.1. Tindak Kejahatan

Banyak sedikitnya jumlah korban tindak kejahatan menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Karena dengan adanya rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Korban Kejahatan sendiri adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

**Gambar 7.1. Persentase Penduduk Kabupaten Bogor yang Pernah Menjadi Korban Tindak Kejahatan, 2018 dan 2019**

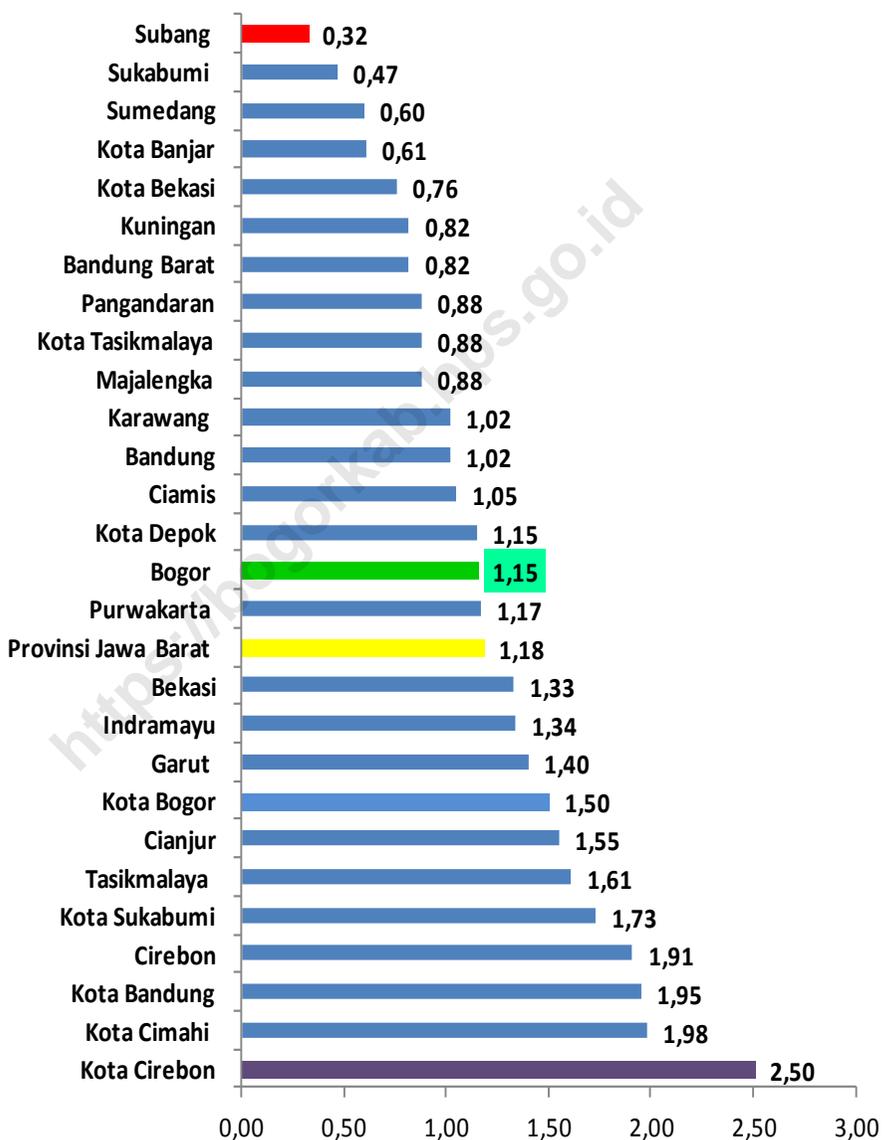


Sumber : Susenas, 2018 dan 2019

Selama periode 1 Januari-31 Desember 2019 penduduk Kabupaten Bogor yang menjadi korban tindak kejahatan mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari 1,22 persen (2018) menjadi 1,15 persen (2019). Apabila kita melihat secara jenis kelamin, laki-laki lebih besar risikonya menjadi korban tindak kejahatan daripada perempuan. Namun di tahun 2019 persentase penduduk perempuan yang mengalami tindak kejahatan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 0,73 persen meningkat menjadi 1,05 persen.

Tingkat keamanan di suatu wilayah dapat digunakan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Persentase korban tindak kejahatan yang tinggi mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Berdasarkan hasil olahan Susenas 2019, dari 27 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, ada sekitar 11 Kabupaten Kota yang angka korban tindak kejahatannya di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terdapat sekitar 1,18 persen korban yang menjadi tindak kejahatan selama bulan 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Selama Wilayah yang paling rawan terjadi tindak kriminalitas berada di Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 2,50 persen. Sementara wilayah yang paling aman adalah Kabupaten Subang dimana angka korban tindak kejahatannya hanya sekitar 0,32 persen. Kabupaten Bogor angka korban kejahatan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dibawah rata-rata provinsi yaitu sebesar 1,15 persen.

**Gambar 7.2. Persentase Penduduk yang Mengalami Korban Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2019**



Sumber : Susenas, 2019

## **7.2. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Penggunaan telepon seluler (*handphone*) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sedangkan telepon rumah semakin jarang digunakan dan cenderung ditinggalkan. Di tahun 2019 di Kabupaten Bogor terdapat peningkatan anggota rumah tangga yang menggunakan telepon seluler yaitu yang sebesar 74,30 persen atau meningkat 3,26 persen dari tahun 2018. Jika dilihat tahun sebelumnya tahun 2017 yang menggunakan telepon seluler sebesar 70,52 persen dan tahun 2016 sebesar 60,30 persen. Selebihnya masih menggunakan telepon rumah dan komputer dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya kepemilikan telepon rumah dan semakin meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Selanjutnya terkait penggunaan Telepon Seluler, berdampak pada kemudahan akses internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2019, secara umum terjadi peningkatan sebesar 8,97 persen terhadap anggota rumah tangga yang mengakses internet, dari 47,28 persen di tahun 2018 menjadi 56,25 persen. Dari 56,25 persen, terdapat 53,20 persen penduduk perempuan yang mengakses internet termasuk facebook, twitter, BBM, Whatsapp. Sedangkan penduduk laki-laki sekitar 59,13 persen.

**Tabel 7.1. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam 3 Bulan Terakhir, Kabupaten Bogor 2019**

Jenis Kelamin	Menggunakan Telepon Seluler(HP)/ Nirkabel	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Whatsapp, dll)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	78,19	59,13
Perempuan	70,17	53,20
Total	74,30	56,25

Sumber : Susenas, 2019

### 7.3 Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis

Kredit usaha yang diterima oleh masyarakat akan berdampak positif pada pergerakan ekonomi rakyat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberian kredit usaha ini akan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Program-program kredit usaha dari pemerintah diantaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Selain itu terdapat Jenis program penyaluran yang lain seperti KUPS (Kredit

Usaha Pembibitan Sapi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi).

**Tabel 7.2. Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Pelayanan Kesehatan, 2018 dan 2019**

Indikator	Satuan	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha	%	23,30	22,68
Penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan	%	16,56	45,52
Penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap	%	35,63	72,21

Sumber : Susenas, 2019

Pada tahun 2019 rumah tangga menerima kredit usaha mengalami penurunan sebesar 0,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari 23,30 persen pada tahun 2018 menjadi 22,68 persen pada tahun 2019. Usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kesehatan diantaranya adalah program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat misalnya Program Puskesmas Gratis yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Jaminan pelayanan kesehatan merupakan wujud pelayanan kesehatan yang baik. Jumlah penerima jaminan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk berobat dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.

Berdasarkan hasil Susenas 2019, persentase rumah tangga di Kabupaten Bogor yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan melonjak sebesar 28,96 persen, dari 16,56 persen di tahun 2018 menjadi 45,52 persen di tahun 2019. Begitu juga dengan rumah tangga yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 36,58 persen dari 35,63 (2018) menjadi 72,21 persen (2019).

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://bogorkab.bps.go.id>

# INDIKATOR KESEHATAN RAKYAT KABUPATEN BOGGOR 2019